

زنگنه



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun Anggaran 2022 dapat kami selesaikan. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, diwajibkan untuk menyusun laporan kinerjanya. Laporan Kinerja merupakan salah satu dari enam komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

LKIP ini diharapkan memenuhi mekanisme akuntabilitas Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dalam menyampaikan capaian kinerja serta menjadi perwujudan kewajiban Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk periode 2022. LKIP disusun merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan 2020-2024 yang mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 yang diimplementasikan dalam RKT Tahunan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LKIP Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2022 ini.

Bandung, Januari 2023

Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan  
Jalan



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bentuk akuntabilitas dan perwujudan tata kelola yang baik, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai salah satu unit kerja di Kementerian PUPR mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ) memiliki peran yang strategis di dalam mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga untuk melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dalam penyediaan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berdasarkan kaidah keilmiah tetapi juga implementatif serta memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survei sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menyusun laporan kinerja untuk melaporkan pencapaian kinerja yang sudah dicapai selama tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pada PK 2022, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mendukung sasaran program:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Rating Keselamatan Jalan Nasional melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan dengan rincian output berupa Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR melalui IKK Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan dengan rincian output berupa kegiatan Layanan Perkantoran, kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker dan kegiatan Layanan Sarana Internal.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari laporan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun anggaran 2022 ini adalah sebagai berikut:

### 1. Capaian Kinerja Anggaran

Kinerja dan tingkat penyerapan keuangan dari laporan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun 2022 dilihat berdasarkan e-monitoring PUPR, PAGU Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 11.179.184.000, dengan realisasi sebesar Rp 10.849.204.000 atau menyerap anggaran sebesar 97,05%, sedangkan realisasi fisik sampai akhir tahun anggaran 2022 sudah mencapai nilai 99,63%. Kontribusi terbesar dalam realisasi penyerapan ini adalah kegiatan Layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan yang realisasi keuangannya Rp 6.112.359.000 sebesar 96,51 %, sementara kontribusi terendah adalah kegiatan Layanan sarana internal dengan realisasi keuangannya Rp 869.261.000 sebesar 98.99 %.

### 2. Capaian Kinerja Output

Capaian kinerja output diperoleh dengan cara mengukur dan membandingkan rencana/target output yang ingin dihasilkan berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2022 dengan realisasi output yang mampu dihasilkan dan diwujudkan pada akhir tahun 2022. Dari 5 (lima) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang telah diperjanjikan, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dapat memenuhi semua KRO.

**Tabel Capaian Kerja Output BPLJ TA 2022**

No	OUTPUT	SAT	2022		
			Target	Realisasi	Kinerja
1	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
2	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100
3	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	100
4	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100
5	Layanan Umum	Layanan	1	1	100

- Untuk kegiatan Layanan Keteknikan di Bidang Jalan dan Jembatan, pada Tahun 2022 untuk tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknis, BPLJ telah menerima 216 layanan teknis yang terdiri atas setidaknya 40 kegiatan advis teknis, 18 kegiatan layanan pengujian baik berupa layanan pengujian eksternal (PNBP) maupun layanan pengujian internal, serta pendampingan teknis berupa rapat maupun sebagai narasumber. Sedangkan untuk teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan telah menghasilkan 4 kajian teknis dan 10 pedoman terkait dengan bidang keteknikan perkerasan dan lingkungan jalan.
- Untuk kegiatan Layanan Perkantoran, pada Tahun 2022 telah tercapai 1 layanan karena telah terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran, serta ketepatan dan

kelancaran pembayaran belanja lembur pegawai dalam menunjang kinerja balai, dan terpenuhinya sarana dan prasarana rumah tangga dan perkantoran yang berfungsi dengan baik, serta lancar dan nyaman bagi seluruh kegiatan perkantoran

- Untuk kegiatan Layanan Umum, pada Tahun 2022 telah tercapai 1 layanan karena telah terpenuhinya kebutuhan operasional pimpinan dan kebutuhan operasional kegiatan kesatkeran sesuai dengan anggaran selama periode waktu 1 (satu) tahun untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi dari Balai perkerasan dan Lingkungan Jalan.
  - Untuk kegiatan Layanan Sarana Internal, pada Tahun 2022 telah tercapai 1 unit karena telah terpenuhinya pengadaan untuk fasilitas perkantoran dan laboratorium untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai perkerasan dan Lingkungan Jalan.
  - Untuk kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, pada Tahun 2022 telah tercapai 1 layanan yang mencakup Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Komunikasi Publik (Kehumasan), Pembangunan Zona Integritas, Administrasi PNPB, dan Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko.
3. Kendala dan Permasalahan

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada Tahun 2022 yang berdampak pada capaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, diantaranya terkait perencanaan awal RKA dan PK yang belum cukup matang, perubahan kebijakan pimpinan yang bersifat direktif berpengaruh terhadap efektivitas kinerja balai, pendistribusian pekerjaan bagi SDM belum berimbang (ketimpangan kuantitas dan kualitas), keterlambatan perbaikan alat survei akibat kebijakan penggunaan produk dalam negeri yang mengharuskan menggunakan sumber daya local, dan beban kerja SDM yang berlebih.

Secara umum target dan sasaran yang telah diperjanjikan oleh Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada tahun 2022 secara pencapaian kuantitas output dapat dituntaskan dengan baik, sedangkan secara kualitas output dan anggaran diperlukan rekomendasi strategi dan tindak lanjut guna meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>VIII</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi.....	3
1.4 Isu Strategis .....	5
1.4.1 Keselamatan Dan Geometrik Jalan.....	5
1.4.2 Over Dimension Over Loading (ODOL).....	5
1.4.3 Kemantapan Jalan Nasional .....	5
1.4.4 Harmonisasi Antar Standar Acuan .....	6
1.4.5 Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN), Penggunaan E-Katalog dan <i>Refocusing Anggaran</i> .....	6
<b>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Uraian Singkat Restra BPLJ .....	7
2.1.1 Penjabaran Visi dan Misi.....	7
2.1.2 Tujuan dan Sasaran BPLJ .....	9
2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPLJ .....	12
2.2 Perjanjian Kinerja .....	13
2.2.1 Perbandingan PK Tahun 2022 dengan PK Tahun 2021 .....	13
2.2.2 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2022 .....	16
2.3 Metode Pengukuran .....	18
2.4 Target Kinerja BPLJ .....	21
<b>BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI .....</b>	<b>25</b>
3.1 Sumber Daya Manusia .....	25
3.1.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) .....	25
3.1.2 Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) .....	28
3.1.3 Konsultan Individu.....	30
3.2 Sarana Prasarana .....	31
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	35
<b>BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>37</b>

4.1	Capaian Kinerja Organisasi .....	37
4.2	Perbandingan Kinerja Organisasi .....	67
4.3	Realisasi Anggaran .....	70
4.4	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Balai TA.2021 .....	74
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>		<b>78</b>
5.1	Permasalahan .....	78
5.2	Rekomendasi .....	78
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>IX</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Penyesuaian Tugas Subkoordinator .....	4
<b>Tabel 2.1</b> Cascading Renstra BPLJ (2020-2024).....	10
<b>Tabel 2.2</b> Output Indikator Kinerja BPLJ (2020-2024).....	10
<b>Tabel 2.3</b> Indikator Kinerja Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Parameter BPLJ Tahun 2022 .....	13
<b>Tabel 2.4</b> Perbandingan Sasaran Kegiatan, Output dan Kegiatan 2021 dan 2022 BPLJ .....	14
<b>Tabel 2.5</b> Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2022 (Outcome).....	16
<b>Tabel 2.6</b> Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2022 ( <i>Output</i> ) .....	16
<b>Tabel 2.7</b> Pengukuran Indikator Kinerja 2022 BPLJ.....	20
<b>Tabel 2.8</b> Target Renstra BPLJ Tahun 2020-2024.....	21
<b>Tabel 2.9</b> Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2022 dengan Renstra 2022 .....	22
<b>Tabel 2.10</b> Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2022 dengan Renstra 2022 .....	22
<b>Tabel 2.11</b> Indikator Kinerja Utama BPLJ (2020-2024) .....	23
<b>Tabel 3.1</b> Rincian Aset BMN Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan .....	32
<b>Tabel 3.2</b> Alokasi Anggaran DIPA Satker BPLJ TA 2022.....	35
<b>Tabel 3.3</b> Kronologis Perubahan DIPA Satker BPLJ TA 2022 .....	36
<b>Tabel 4.1</b> Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program TA.2022.....	37
<b>Tabel 4.2</b> Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	38
<b>Tabel 4.3</b> Capaian Kinerja IKU BPLJ 2022 .....	38
<b>Tabel 4.4</b> Output Teknologi Bidang Jalan yang Di Kembangkan .....	44
<b>Tabel 4.5</b> Perbandingan Capaian Output Kinerja Beberapa Tahun Terakhir.....	67
<b>Tabel 4.6</b> Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra.....	67
<b>Tabel 4.7</b> Perbandingan Capaian <i>Outcome</i> Kinerja Beberapa Tahun Terakhir .....	68
<b>Tabel 4.8</b> Perbandingan Capaian Output Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dan Balai Bahan Jalan TA.2022.....	69
<b>Tabel 4.9</b> Perbandingan Realisasi Anggaran dengan PAGU Anggaran Tahun 2022 .....	70
<b>Tabel 4.10</b> Perbandingan Realisasi Anggaran Satker BPLJ .....	74
<b>Tabel 4.11</b> Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPLJ .....	75



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.....	4
<b>Gambar 2.1</b> Peta Strategi Renstra BPLJ .....	11
<b>Gambar 2.2</b> Perjanjian Kinerja Awal BPLJ Tahun 2022.....	17
<b>Gambar 2.3</b> Perjanjian Kinerja Revisi BPLJ Tahun 2022.....	17
<b>Gambar 3.1</b> SDM PNS Berdasarkan Gender .....	26
<b>Gambar 3.2</b> SDM PNS Berdasarkan Golongan.....	26
<b>Gambar 3.3</b> SDM PNS Berdasarkan Usia .....	27
<b>Gambar 3.4</b> SDM PNS Berdasarkan Pendidikan.....	27
<b>Gambar 3.5</b> SDM PNS Berdasarkan Jabatan.....	28
<b>Gambar 3.6</b> SDM Non PNS Berdasarkan Gender .....	28
<b>Gambar 3.7</b> SDM Non PNS Berdasarkan Usia.....	29
<b>Gambar 3.8</b> SDM Non PNS Berdasarkan Pendidikan .....	29
<b>Gambar 3.9</b> SDM Non PNS Berdasarkan Jabatan .....	30
<b>Gambar 3.10</b> SDM KI Berdasarkan Gender .....	30
<b>Gambar 3.11</b> SDM KI Berdasarkan Usia .....	31
<b>Gambar 3.12</b> SDM KI Berdasarkan Pendidikan.....	31
<b>Gambar 4.1</b> Dokumentasi Layanan Teknis.....	39
<b>Gambar 4.2</b> Redokumentasi Sistem Alat Heavy Vehicle Simulator Tahun 2022.....	43
<b>Gambar 4.3</b> Dokumentasi Perbaikan Alat Heavy Vehicle Simulator Tahun 2022.....	43
<b>Gambar 4.4</b> Perbaikan Alat Pengukur Kekuatan Jalan (APKJ) Tahun 2022 .....	43
<b>Gambar 4.5</b> Pembayaran Belanja Uang Lembur Tahun 2022 .....	57
<b>Gambar 4.6</b> Belanja Sehari-hari Perkantoran Tahun 2022 .....	57
<b>Gambar 4.7</b> Pemeliharaan Gedung Balai dan Laboratorium Tahun 2022.....	57
<b>Gambar 4.8</b> Dokumentasi Perjalanan Dinas Pimpinan .....	62
<b>Gambar 4.9</b> Kegiatan Kepegawaian Tahun 2022 .....	66
<b>Gambar 4.10</b> Kurva S Realisasi dan Rencana Fisik TA 2022 .....	72
<b>Gambar 4.11</b> Kurva S Realisasi dan Rencana Keuangan TA 2022 .....	72
<b>Gambar 4.12</b> Dokumentasi Pembahasan Laporan Kinerja TA 2022, Perjanjian Kinerja (PK) 2022 dan Reviu Renstra BPLJ .....	76

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah instrumen yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap unit kerja dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi. Penyelenggaraan Laporan kinerja mengacu kepada Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan laporan wajib yang harus disiapkan, disusun dan dilaporkan secara periodik dan melembaga.

Selain itu, dalam upaya memenuhi amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, Instansi Pemerintah diharuskan menyampaikan pelaporan kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai Unit Eselon III yang berkoordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan dibawah Direktorat Jenderal Marga Kementerian PUPR berkewajiban membuat LKIP yang diterbitkan setiap berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, LKIP ini berisi tentang ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (PK). Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi indikator kinerja, penjelasan atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

LKIP Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada kinerja Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebijakan dan sasaran menjadi acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang kemudian dirumuskan kedalam Penetapan

Kinerja (PK), serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT). LKIP menjadi dokumen untuk mengukur dan mengevaluasi indikator kinerja serta tolak ukur bagi organisasi dalam menjawab tantangan pembangunan bidang jalan dan jembatan.

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan dan peralatan survei melalui koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 124 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang struktur perkerasan dan lingkungan jalan;
- b. Pelaksanaan penyiapan kesiapterapan teknologi bidang struktur perkerasan dan lingkungan jalan;
- c. Pelaksanaan uji laboratorium lapangan, sertifikasi, inspeksi dan kliring teknologi bidang jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan layanan teknis dan penyiapan penerbitan rekomendasi teknis di bidang struktur perkerasan dan lingkungan jalan;
- e. Pengembangan sistem monitoring bidang struktur dan perkerasan dan lingkungan jalan; dan
- f. Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga didukung oleh unit-unit di bawahnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### 1.3 Struktur Organisasi

Sebagai manifestasi dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka disusun: i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; iii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar penjabaran struktur organisasi dan pelaksanaan tugas serta fungsi seluruh unit kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai unit kerja di bawahnya. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, struktur organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan unit kerja yang berada dibawahnya terdiri atas :

1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga dapat dilihat dalam Gambar 1.1.



**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Adapun untuk menjalankan organisasi tersebut, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan didukung oleh 2 (dua) Subkoordinator. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini, terdapat penyesuaian bidang subkoordinator dari yang sebelumnya terbagi menjadi Subkoordinator: (1) Pengembangan dan Penerapan Teknologi, dan (2) Layanan Teknis menjadi Subkoordinator: (1) Bidang Struktur Perkerasan dan Drainase Jalan, dan (2) Bidang Geometrik, Keselamatan dan Lingkungan Jalan. Hal ini didasarkan pertimbangan untuk memudahkan koordinasi antar kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahliannya.

**Tabel 1.1** Penyesuaian Tugas Subkoordinator

2021		2022	
(1)	Subkoordinator Bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi;	(1)	Subkoordinator Bidang Struktur Perkerasan dan Drainase Jalan;
(2)	Subkoordinator Bidang Layanan Teknis	(2)	Subkoordinator Bidang Geometrik, Keselamatan dan Lingkungan Jalan

Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli madya dan/atau ahli muda yang ditugaskan untuk menjembatani mekanisme kerja organisasi kepala balai ke kelompok jabatan fungsional. Subkoordinator memiliki fungsi dukungan penerapan teknologi dan layanan teknis pada masing-masing bidang tersebut. Selain itu, Subkoordinator juga bertugas untuk melakukan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.

## 1.4 Isu Strategis

BPLJ merupakan sebuah balai teknik yang berlokasi di lingkungan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan yang muncul akibat perubahan struktur organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020, BPLJ merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan. BPLJ berperan dalam penyediaan rekomendasi kebijakan dan layanan teknis terhadap *stakeholders*, terutama unit-unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga seluruh Indonesia, dan yang terkait di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, serta peralatan survei.

Dalam pemenuhan tugas dan fungsinya, BPLJ tentunya menghadapi tantangan dalam upaya pemenuhan sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024. Pada Tahun Anggaran 2022, isu-isu strategis yang dihadapi BPLJ selain dari pelaksanaan pekerjaan rutin, juga menghadapi pekerjaan yang bersifat direktif sejalan dengan upaya peningkatan konektivitas jaringan jalan, sebagaimana berikut:

### 1.4.1 Keselamatan Dan Geometrik Jalan

Beberapa permasalahan terkait keselamatan dan geometrik jalan menjadi topik utama, yaitu keselamatan dan kecepatan operasional, waktu tempuh, serta biaya operasional kendaraan yang disebabkan potensi bahaya kecelakaan dan kemacetan, diantaranya kelandaian yang tinggi, keberadaan lajur penyelamat yang tidak sesuai dengan spesifikasi, keberadaan objek bahaya sisi jalan (kaku), keterbatasan data beban lalu lintas, serta persimpangan jalan yang belum optimal.

### 1.4.2 Over Dimension Over Loading (ODOL)

Masih berkaitan dengan isu strategis pertama, kebijakan *Zero Over Dimension Over Loading* (ODOL) 2023 adalah pembatasan penertiban batas muatan dan dimensi kendaraan dimaksud untuk mencegah terjadinya kecelakaan, serta memperkecil risiko percepatan kerusakan infrastruktur jalan. Dalam keberjalanannya, masih terdapat permintaan relaksasi pada masa pandemi Covid-19, yaitu toleransi berat muatan hingga 20% dari batas yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah antisipatif BPLJ untuk mencapai komitmen *Zero ODOL* 2023 tersebut.

### 1.4.3 Kemantapan Jalan Nasional

Permasalahan kemantapan jalan belum ditunjang dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air. Hal ini salah satunya disebabkan oleh data aset drainase

jalan melalui inventarisasi, inspeksi, serta penilaian kondisi dan program penanganan drainase jalan belum menjadi pertimbangan strategis dalam melakukan pemrograman penanganan drainase jalan yang terpadu dalam suatu aplikasi sistem informasi manajemen drainase jalan yang mengedepankan kepastian mutu dan ketepatan anggaran sehingga lebih efisien.

#### 1.4.4 Harmonisasi Antar Standar Acuan

Masih adanya standar acuan yang belum saling terintegrasi dalam implementasi penerapan di lapangan, diantaranya standar acuan spesifikasi umum jalan tol maupun non tol, dan pekerjaan konstruksi dalam desain perkerasan jalan. Lebih rinci dijelaskan sebagaimana berikut:

- (1) Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (revisi 2) dengan Spesifikasi Umum Jalan Tol 2020 yang belum terintegrasi, sehingga rekomendasi atau teknologi perbaikan belum terakomodasi dan belum terbaharukan menyesuaikan kondisi terkini yang ada.
- (2) Perbedaan spesifikasi antara Spesifikasi Umum, dan Manual Desain Perkerasan (MDP) beserta suplemen MDP. Hal ini menimbulkan dualisme standar bagi perencana dan kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terutama dalam desain perkerasan jalan.

#### 1.4.5 Kebijakan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN), Penggunaan E-Katalog dan *Refocusing Anggaran*

Permasalahan terkait kebijakan penggunaan produk dalam negeri, penggunaan e-katalog, dan kebijakan *refocusing* anggaran masih menjadi tantangan pada keberjalanan tugas dan fungsi BPLJ. Pengadaan barang dan jasa telah memperhatikan penggunaan produk dalam negeri dan e-katalog, namun pengadaan alat survei impor menjadi sulit untuk dilakukan. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. PB.01.01-Mn/2775 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR, diperlukan izin untuk melakukan pengadaan barang impor. Sehingga hal tersebut berakibat *multipplier effect* pada *refocusing* anggaran pada Tahun 2022.

Selain itu, terjadinya bencana alam dan perubahan iklim dan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung menjadi isu strategis yang menyertai tantangan dalam pemenuhan tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

## BAB 2

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Uraian Singkat Restra BPLJ

#### 2.1.1 Penjabaran Visi dan Misi

Visi Kementerian PUPR 2020-2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024, adalah sebagai berikut:

#### **VISI (Kementerian PUPR)**

*Kementerian PUPR yang andal, responsif, inovatif dan profesional dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*

Misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR sebagai dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

#### **MISI (Kementerian PUPR)**

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Visi Kementerian PUPR kemudian diejawantahkan ke dalam bentuk tujuan dan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai salah satu unit organisasi di bawah Kementerian PUPR yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan mendapatkan amanah untuk meningkatkan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan



pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing dengan sasaran strategis meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan indikator kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km). Sehingga misi Direktorat Jenderal Bina Marga dirumuskan sebagai berikut:

### **Misi Direktorat Jenderal Bina Marga**

*M.1 Meningkatkan KONEKTIVITAS dan PELAYANAN jalan nasional;*

*M.2 Meningkatkan EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN jalan nasional;*

Adapun penjabaran dari misi Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020–2024 adalah:

1. Misi 1 (M.1) merupakan misi yang berkaitan dengan komitmen Direktorat Jenderal Bina Marga dalam menyediakan konektivitas dan pelayanan jalan nasional. Konektivitas merupakan mandat dari Presiden Republik Indonesia 2020–2024 yang melalui RPJMN 2020-2024 menginginkan terwujudnya konektivitas jalan nasional melalui indikator waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau menjadi minimal 1,9 jam per 100 km. Sedangkan pelayanan jalan merupakan pelaksanaan dari mandat pasal 37 (1) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyatakan bahwa hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi: aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kondisi jalan dan kecepatan.
2. Misi 2 (M.2) merupakan misi internal (yang menjadi institution concern) berkaitan dengan upaya dari Direktorat Jenderal Bina Marga untuk meningkatkan kemampuannya (secara andal, profesional, inovatif, dan berintegritas) dalam melaksanakan program penyelenggaraan jalan nasional secara efektif dan efisien. Dimana cakupan kegiatan penyelenggaraan jalan yang sesuai dengan pasal 1 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Tujuan Ditjen Bina Marga dalam menyelenggarakan jalan nasional pada periode 2020–2024 terdiri dari 4 (empat) butir sebagai berikut:

1. Mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;
2. Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di lingkungan Ditjen Bina Marga.

Adapun sasaran strategis Ditjen Bina Marga tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional
  - a. Peningkatan pelaksanaan preservasi dan tingkat kapasitas jalan nasional;
  - b. Pencapaian pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol; dan
  - c. Peningkatan pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan.
2. Meningkatnya kualitas manajemen birokrasi yang professional dan akuntabel, kebijakan dan strategi serta pelaksanaan tugas teknis lainnya.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran BPLJ

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ) memiliki peran yang strategis di dalam mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga untuk melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dalam penyediaan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berdasarkan kaidah keilmiah tetapi juga implementatif serta memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survei.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Ditjen Bina Marga, pada tahun 2020–2024, program kegiatan di BPLJ bertujuan untuk:

1. Melakukan layanan keteknikan di bidang perkerasan dan lingkungan jalan dalam mengatur dan membina penyelenggaraan jalan dan jembatan berupa 5 (lima) dokumen teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan dan 100% tingkat fasilitas pengujian laboratorium dan advis teknik; serta
2. Melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas manajemen birokrasi Ditjen Bina Marga.

Sasaran kegiatan BPLJ merupakan penjabaran dari tujuan sebagai ukuran tercapainya hasil (output) kegiatan dalam periode lima tahun ke depan (2020–2024). Untuk dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders* dan pengguna layanan dari BPLJ maka dirumuskan sasaran kegiatan BPLJ tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengembangan teknologi bidang perkerasan dan lingkungan jalan dengan indikator kinerja dihitung dari jumlah teknologi yang dihasilkan; dan
2. Terlaksananya pengujian laboratorium dan advis teknik dengan indikator tingkat fasilitas 100%.

Sasaran dan indikator kinerja kegiatan BPLJ tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat melalui *cascading* pada Tabel 2.1. Sedangkan untuk jumlah output dari indikator kinerja kegiatan dirangkum pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.1 Cascading Renstra BPLJ (2020-2024)**

SS	IKSS	SP	IKSP	SK	IKK	Output Fisik	Output Non Fisik
Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Jumlah dokumen pengembangan teknologi bidang Jalan dan Jembatan	
			Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)		Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	Jumlah dokumen layanan pengujian laboratorium dan advis teknik	
			Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik blackspot per populasi)				
		Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan		Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan Perkantoran		

**Keterangan:**

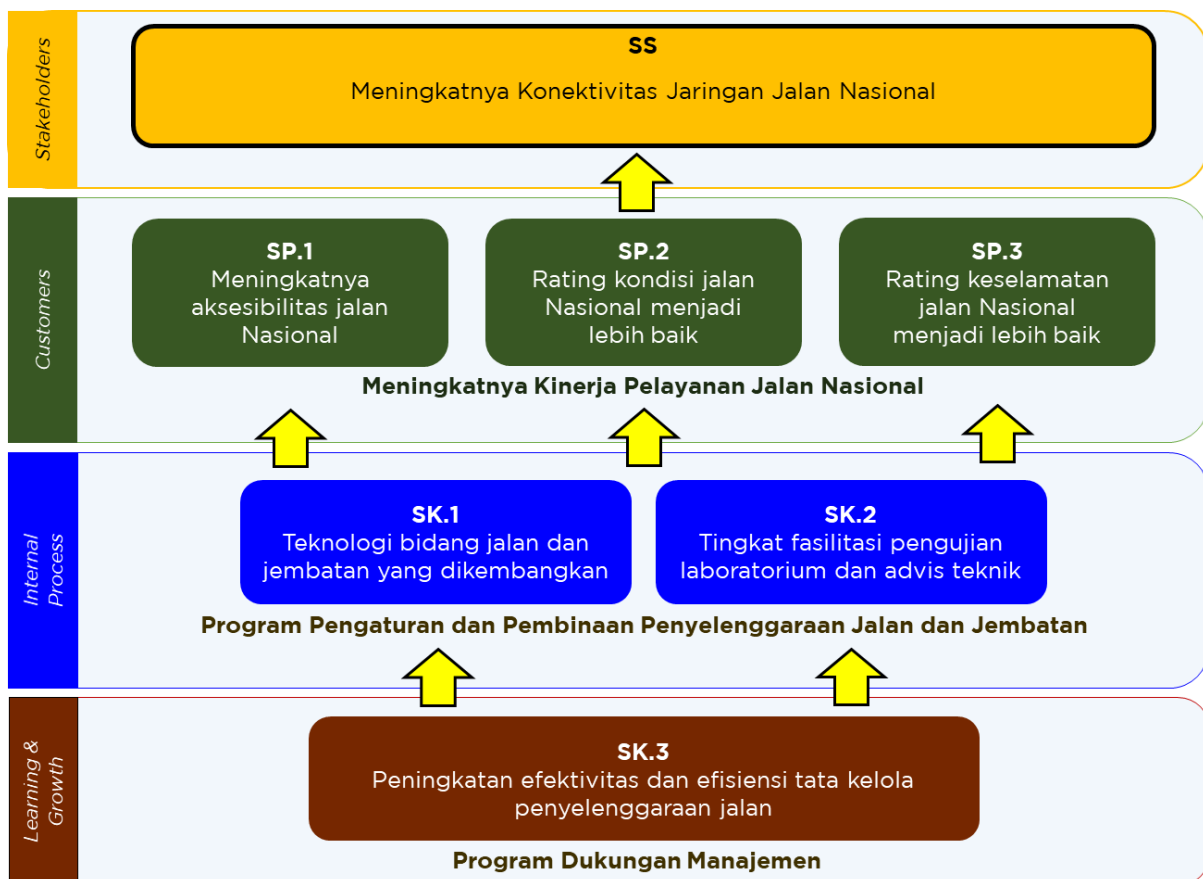
- SS Sasaran Strategis
- IKSS Indikator Kinerja Sasaran Strategis
- SP Sasaran Program
- IKSP Indikator Kinerja Sasaran Program
- SK Sasaran Kegiatan
- IKK Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

**Tabel 2.2 Output Indikator Kinerja BPLJ (2020-2024)**

Indikator Kinerja	Satuan	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
UNIT PELAKSANA TEKNIS: BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN								
KEGIATAN: Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:								
1	Layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan							
Parameter	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Jumlah	1	1	1	1	1	5
Output	Jumlah dokumen pengembangan teknologi bidang Jalan dan Jembatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5
Parameter	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Output	Jumlah dokumen layanan pengujian laboratorium dan advis teknik	Dokumen	1	1	1	1	1	5
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan								
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:								

Indikator Kinerja	Satuan	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker							
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5
3	Layanan Perkantoran							
	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5

Dalam melaksanakan kegiatan, BPLJ melakukan beberapa pendekatan prespektif dengan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dalam merumuskan sasaran. Sasaran kegiatan dibagi menjadi 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process* dan perspektif *learning and growth*. Deskripsi penerapan BSC tersebut diilustrasikan dalam bentuk peta strategi sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1** Peta Strategi Renstra BPLJ

### 2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPLJ

BPLJ akan mendukung secara penuh strategi implementasi dari arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk periode 2020 hingga 2024. Arah kebijakan dan strategi BPLJ adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan penerapan teknologi perkerasan dan lingkungan jalan
 

Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi yang dilakukan untuk mendukung direktorat-direktorat di Ditjen Bina Marga di bidang perkerasan dan lingkungan jalan. Kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi di BPLJ adalah:

  - 1) Peningkatan kompetensi SDM dalam pengembangan teknologi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan
  - 2) Pemenuhan SDM dengan jabatan fungsional perekayasa untuk menunjang kegiatan keperekayasaan bidang perkerasan dan lingkungan jalan
  - 3) Peningkatan kerjasama dengan perusahaan, universitas, atau instansi lain yang bergerak di bidang iptek perkerasan dan lingkungan jalan
  - 4) Penyusunan kajian kebijakan untuk mendukung penyusunan NSPK di bidang perkerasan dan lingkungan jalan
  - 5) Pelaksanaan kajian kesiapterapan teknologi perkerasan dan lingkungan jalan untuk nya di Indonesia
  - 6) Pelaksanaan kliring teknologi untuk mendukung pengembangan teknologi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan
  
- b. Pelaksanaan layanan teknis
 

Layanan teknis BPLJ meliputi penilaian kualitas konstruksi, pengkajian dan advis teknis untuk perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi, dan mitigasi bencana di bidang struktur perkerasan dan drainase jalan, analisa beban lalu lintas, lingkungan jalan, keselamatan jalan, dan instrumentasi dan peralatan survei atau inspeksi serta layanan pengujian laboratorium untuk mendukung balai pelaksana jalan. Kegiatan layanan teknis dijabarkan sebagai berikut:

  - 1) Penilaian kualitas konstruksi melalui penyediaan pengujian dan kalibrasi baik di laboratorium maupun di lapangan;
  - 2) Pelaksanaan advis teknis terkait permasalahan di lapangan di bidang perkerasan dan lingkungan jalan;
  - 3) Penyusunan rekomendasi teknis untuk kajian permasalahan di lapangan yang mendalam di bidang perkerasan dan lingkungan jalan; dan
  - 4) Pelaksanaan mitigasi bencana alam di bidang perkerasan dan lingkungan jalan.

c. Penerapan zona integritas

- 1) Pembentukan kelompok kerja (Pokja) zona integritas yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penataan Tata Laksana, dan Sekretariat;
- 2) Pelaksanaan sosialisasi kepada pegawai dan stakeholder terkait tentang Zona Integritas; dan
- 3) Penyelenggaraan kegiatan yang bersih dari KKN.

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

### 2.2.1 Perbandingan PK Tahun 2022 dengan PK Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2022 merupakan perjanjian kinerja baru berbeda dari Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Tahun 2021 karena disesuaikan berdasarkan Rencana Strategis Bina Marga Tahun 2020-2024 serta tugas dan fungsi balai. Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja menjadi tolak ukur kinerja dan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian output Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 dibawah ini akan menjelaskan keselarasan *outcome*, output dan kegiatan 2022 di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan sebagai berikut:

**Tabel 2.3** Indikator Kinerja Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Parameter BPLJ Tahun 2022

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)/ Outcome	Sasaran Kegiatan	Parameter
IKSP 3 Tingkat Rating Keselamatan	Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1. Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik
		2. Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan

**Tabel 2.4** Perbandingan Sasaran Kegiatan, Output dan Kegiatan 2021 dan 2022 BPLJ

Sasaran Kegiatan	Parameter	Penganggaran 2021	Penganggaran 2022
<p><b>Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan</b></p>	<p>1. Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik;</p>	<p>Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan</p>	<p>Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan a. Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan</p>
	<p>2. Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan.</p>	<p>Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan</p>	<p>b. Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan c. Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pendukung Pengujian</p>

Sasaran Kegiatan	Parameter	Penganggaran 2021	Penganggaran 2022
<p style="text-align: center;"><b>Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan</b></p>	<p>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</p>	<p>Layanan Sarana dan Prasana Internal</p> <p>a. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</p>	<p>Layanan Sarana Internal</p> <p>a. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</p>
		<p>Layanan Dukungan Manajemen Satker</p> <p>a. Layanan PNBP</p> <p>b. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan</p> <p>c. Operasional Pimpinan</p> <p>d. Administrasi Kesatkeran</p>	<p>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</p> <p>a. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan</p>
		<p>Layanan Perkantoran</p> <p>a. Belanja Uang Lembur</p> <p>b. Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana</p> <p>c. Kebutuhan Operasional Perkantoran</p>	<p>Layanan Umum</p> <p>a. Adminsitrasi Kesatkeran</p> <p>b. Operasional Pimpinan</p> <p>Layanan Perkantoran</p> <p>a. Belanja Uang Lembur</p> <p>b. Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana</p> <p>c. Operasional Perkantoran</p>



## 2.2.2 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) BPLJ Tahun 2022 mengalami satu kali perubahan yaitu PK Awal dan PK Revisi. PK Awal ditetapkan pada bulan Januari 2022, sedangkan PK Revisi disusun pada bulan November 2022 setelah adanya perubahan revisi DIPA BPLJ revisi 3. Adapun Perbandingan PK Awal dan Revisi dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6. Sedangkan dokumen PK Awal dan Revisi dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.

**Tabel 2.5** Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2022 (Outcome)

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KET
			PK AWAL	PK REVISI	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					
IKP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional					
Parameter	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100	100	
Parameter	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Dokumen	1	1	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
Parameter	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100	100	

**Tabel 2.6** Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2022 (Output)

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KET
			PK AWAL	PK REVISI	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					
IKP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional					
IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan		%	100	100	
1	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KET
			PK AWAL	PK REVISI	
	IKK : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola	%	100	100	
2	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	
3	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	1	1	
4	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	
5	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021	Target 2022
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	100 %	100 %
	Parameter Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advisi teknik	100 %	100 %
	Parameter Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	1 Dokumen	1 Dokumen
	Rincian Output		
ABF 001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan

Kegiatan :

1. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran

Rp 11.929.184.000

Bandung, Januari 2022  
Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Direktur Jenderal Bina Marga,  
  
Hedy Rahadian

Neni Kusnianti

**Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal BPLJ Tahun 2022**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021	Target 2022	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional			
	IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	100 %	100,00 %	
	Parameter Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advisi teknik	100,00 %	100,00 %	
	Parameter Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	
	Rincian Output			
ABF 001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1,00 Rekomendasi Kebijakan	1,00 Rekomendasi Kebijakan	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR			
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100 %	100,00 %	
	Parameter Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	100,00 %	100,00 %	
	Rincian Output			
	EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00 Layanan	1,00 Layanan
	EBA 962	Layanan Umum	1,00 Layanan	1,00 Layanan
EBA 994	Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	1,00 Layanan	
EBB 951	Layanan Sarana Internal	1,00 Unit	1,00 Unit	

Kegiatan :

1. Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran

Rp 6.333.263.000

Rp 4.845.921.000

Rp 11.179.184.000

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

Bandung, 20 Desember 2022  
Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Neni Kusnianti

**Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi BPLJ Tahun 2022**

## 2.3 Metode Pengukuran

Dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholders* dan pengguna layanan BPLJ maka sebagai salah satu persyaratan terciptanya kinerja yang terencana dan terukur, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada setiap tahun anggaran sehingga dapat menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Capaian kinerja setiap indikator kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam dokumen LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) pada tiap tahunnya. Pengukuran kinerja diperlukan selain untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan jalan, juga digunakan sebagai alat evaluasi tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan dan ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya.

Pengukuran kinerja kegiatan diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dilakukan dengan cara sebagai berikut

### 1. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Keseluruhan

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Keseluruhan dilakukan dengan cara menghitung realisasi output terhadap target capaian setiap indikator di tahun berjalan, serta merubahnya ke dalam persentase untuk mengetahui tingkat pencapaian setiap output tersebut, kemudian dijumlahkan untuk seluruh indikator dan dirata - ratakan. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja keseluruhanyang terdapat pada Renstra Dirjen Bina Marga 2020-2024 dihitung dari rerata persentase indikator:

- a. Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan (Jumlah 1);
- b. Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik (100%);

Rumus untuk menghitung persentase capaian kinerja keseluruhan adalah sebagai berikut:

$$\sigma = \frac{a + b}{2}$$

Output dari parameter Teknologi Bidang Jalan dan jembatan yang dikembangkan adalah satu (1) dokumen setiap tahunnya yang berisi beberapa kajian kebijakan, rekomendasi teknis, dan pengembangan alat baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk survei atau inspeksi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan sehingga teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh Balai Pelaksana Jalan siap untuk diterapkan guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran

strategis Direktorat Jenderal Bina Marga. Sedangkan untuk Parameter tingkat fasilitas pengujian laboratorium dan advis teknik, output berupa satu (1) dokumen per tahun dengan rincian beberapa pengujian dan advis teknik yang difasilitasi. Tingkat fasilitasi pelayanan dengan presentase 100% yaitu dengan dasar penilaian adalah sebagai jumlah pengujian dan advis teknik yang direspon oleh BPLJ baik itu diterima maupun ditolak.

## 2. Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan antara jumlah target dengan jumlah capaian Kinerja. Pengukuran kinerja terhadap output kegiatan dilakukan dengan membandingkan jumlah output yang dicapai pada tahun anggaran berjalan dengan target keseluruhan Renstra, kemudian diubah menjadi bentuk persentase. Perhitungan capaian output dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Output} = \frac{\text{Capaian Output Tahun Berjalan}}{\text{Target Jumlah Output Keseluruhan}} \times 100\%$$

Pengukuran pencapaian parameter indikator kinerja teknologi jalan dan jembatan yang dikembangkan disusun berupa pelaporan pengkajian kebijakan maupun teknologi bidang perkerasan dan lingkungan jalan yang dikembangkan yang disusun dalam bentuk dokumen Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Sedangkan pencapaian parameter indikator kinerja tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik diukur dengan membandingkan jumlah layanan teknis yang dilaksanakan di bandingkan terhadap jumlah layanan teknis yang diterima.

$$\text{Tingkat Fasilitasi Layanan Teknis} = \frac{\text{Jumlah Layanan Teknis yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Layanan Teknis yang diterima}} \times 100\%$$

## 3. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Internal

Agar didapat pengukuran kinerja yang sesuai dengan ketentuan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bond*), BPLJ menyusun metode pengukuran kinerja internal yang didasarkan atas parameter Indikator kinerja utama BPLJ. Metode perhitungan parameter untuk setiap indikator teknis pada tahun 2022 disesuaikan melalui SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan beserta Perubahannya yang dapat dilihat pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.7** Pengukuran Indikator Kinerja 2022 BPLJ

No	Parameter	Pengukuran Parameter	Penjelasan Pengukuran
1.	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Persentase penyampaian teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah diterapkannya kajian teknologi dan rekomendasi kebijakan}}{\text{Jumlah kajian teknologi dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100$
2.	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	Persentase kepuasan pelanggan fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	Perhitungan persentase kepuasan pelanggan mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik

Untuk selanjutnya pencapaian masing-masing parameter dibandingkan dengan target yang mengacu kepada Rencana Strategis Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan 2020-2024.

Perhitungan persentase output diperoleh dari membagi jumlah penerapan kajian dengan jumlah kajian yang disampaikan dalam satu tahun. Penerapan diukur melalui surat penyampaian ke *stakeholder* yang membutuhkan, pelatihan, sosialisasi yang berisi beberapa kajian teknologi, rekomendasi kebijakan, dan pengembangan alat baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk survei atau inspeksi di bidang perkerasan lingkungan jalan yang selanjutnya diterapkan sehingga teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* terkait khususnya Direktorat Bina Teknik dan Balai Pelaksana Jalan telah diterapkan guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Marga. Sedangkan untuk pelaksanaan pengujian, kliring teknologi, inspeksi, dan advis teknik, output diukur dari persentase kepuasan pelanggan yang menggunakan layanan BPLJ. Perhitungan persentase kepuasan pelanggan mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

#### **4. Penanggung jawab pengumpulan data dan pengukuran kinerja**

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada Tahun 2022, dilakukan oleh Tim Penyelenggara SAKIP BPLJ sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Nomor: 9/KPTS/Bb.37/2022. Tim Penyelenggara SAKIP BPLJ tahun 2022 terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat.

Terkait dengan pengumpulan data dan pengukuran kinerja, masing-masing bagian Tim turut bekerjasama dalam pengumpulan data dan pengukuran kinerja, yang terdiri dari:

1. Tim Sekretariat memiliki tugas untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SAKIP serta membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan penyelenggaraan SAKIP.
2. Tim Pelaksana bertugas untuk menyusun dokumen-dokumen SAKIP seperti Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, SK Indikator Kinerja Utama, Laporan Monev Bulanan, serta LKIP yang didalamnya berisi pengukuran Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.
3. Pengarah menjadi penentu dalam memberikan pengarahan penyelenggaraan SAKIP secara menyeluruh.

#### 2.4 Target Kinerja BPLJ

Penyusunan target kinerja tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan yaitu Renstra Bina Marga tahun 2020-2024 dan Renstra Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun 2020-2024, adapun target capaian Renstra pada tahun 2020– 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8.

**Tabel 2.8** Target Renstra BPLJ Tahun 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Total
<b>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</b>	Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	%	100
	<i>Parameter</i>		
	1. Tingkat Fasilitasi Pengujian Laboratorium dan Advis Teknik	%	100
	2. Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan yang dikembangkan	Jumlah	5

Target kinerja 2022 Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10.

**Tabel 2.9** Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2022 dengan Renstra 2022

NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</b>						
1	Rating Keselamatan Jalan Nasional					
	Parameter Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100	100	100	
	Parameter Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Dokumen	1	1	1	
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>						
2	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
	Parameter Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100	100	100	

**Tabel 2.10** Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2022 dengan Renstra 2022

NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</b>						
<b>IKP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>						
1	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>						
<b>IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>						
2	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	
3	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	1	1	1	
4	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	
5	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	

Adapun indikator kinerja utama yang berlaku secara internal di BPLJ disusun sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan operasional sehingga memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bond*) disajikan dalam Tabel 2.11.

**Tabel 2.11** Indikator Kinerja Utama BPLJ (2020-2024)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
UNIT PELAKSANA TEKNIS: BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN							
KEGIATAN: Pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan							
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan							
INDIKATOR KINERJA UTAMA: Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan							
<i>Parameter</i>	Pelaksanaan kajian teknologi bidang jalan dan jembatan						
<i>Output</i>	Penyampaian kajian teknologi dan rekomendasi kebijakan	%	90	90	90	90	90
<i>Parameter</i>	Pelaksanaan pengujian, kliring teknologi, inspeksi, dan advis teknik						
<i>Output</i>	Kepuasan pelanggan	%	80	82	85	87	90

Output dari pelaksanaan kajian teknologi bidang perkerasan dan lingkungan jalan adalah persentase penyampaian kajian teknologi dan rekomendasi kebijakan ke direktorat-direktorat Ditjen Bina Marga, balai pelaksana jalan, dan instansi lain yang terkait dengan perkembangan teknologi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan setiap tahunnya.

Dalam menjamin terlaksananya efektivitas dan efisiensi di dalam proses internal balai untuk memenuhi harapan *stakeholders* dan *customers*, maka diperlukan upaya tata pengelolaan sumber daya melalui proses *learning and growth*, yang meliputi:

1. Peningkatan terhadap layanan sarana dan prasarana internal;
2. Peningkatan terhadap layanan organisasi dan tata kelola internal
3. Peningkatan terhadap layanan umum; dan
4. Peningkatan terhadap layanan perkantoran



Layanan sarana dan prasarana internal merupakan kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran seperti rehabilitasi gedung, pembangunan fasilitas, dan pemenuhan kebutuhan peralatan, mesin, maupun sarana prasarana yang mendukung tugas dan fungsi BPLJ. Output dari layanan sarana dan prasarana internal adalah 1 unit. Layanan organisasi dan tata kelola internal merupakan kegiatan pelayanan umum, pelayanan rumah tangga, dan perlengkapan seperti pelaksanaan administrasi ketatausahaan balai, pembangan zona integritas, dan administrasi PNBP. Output dari layanan ini adalah 1 layanan. Layanan umum merupakan kegiatan administrasi kesatkeran dan operasional pimpinan. Output dari layanan ini adalah 1 layanan. Layanan Perkantoran terdiri dari kegiatan pengadministrasian dan pengelolaan gaji/tunjangan, dan honorarium ASN, penggajian pegawai pemerintah non pegawai negeri, serta penyelenggaraan operasional rutin kantor dan pemeliharaan fasilitas. Output dari layanan ini adalah sebanyak 1 layanan selama 12 bulan (1 tahun).

## BAB 3

# KAPASITAS ORGANISASI

### 3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. SDM merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. SDM menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan.

Sumber daya manusia (SDM) di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dibagi ke dalam beberapa rumpun keahlian, yaitu:

- a. Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan Jalan yang meliputi perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan sistem manajemen perkerasan jalan;
- b. Kelompok Bidang Keahlian Teknik Lalu Lintas yang meliputi geometri jalan, keselamatan, analisa beban lalu lintas, kapasitas jalan dan perlengkapan jalan;
- c. Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan Jalan yang meliputi drainase jalan, perizinan UKL/UPL, dan jalan berkelanjutan;

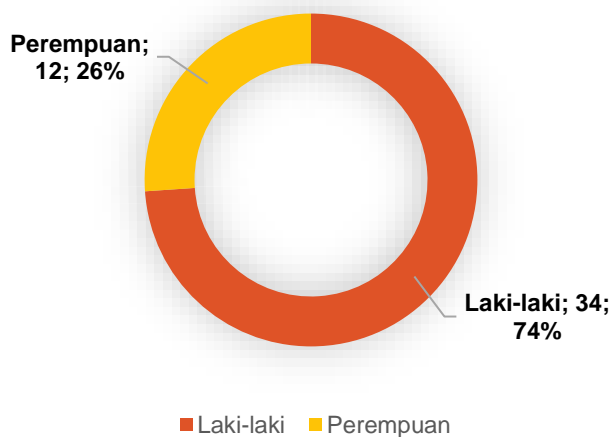
Semua rumpun tersebut didukung oleh SDM di bidang instrumentasi sebagai upaya untuk pengembangan alat dan software yang dapat membantu penyelenggara jalan.

Secara keseluruhan jumlah Sumber daya manusia (SDM) di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan adalah 66 orang yang terdiri dari 46 orang Pegawai Negeri Sipil, 17 orang Non Pegawai Negeri Sipil, dan 3 orang Konsultan Individu.

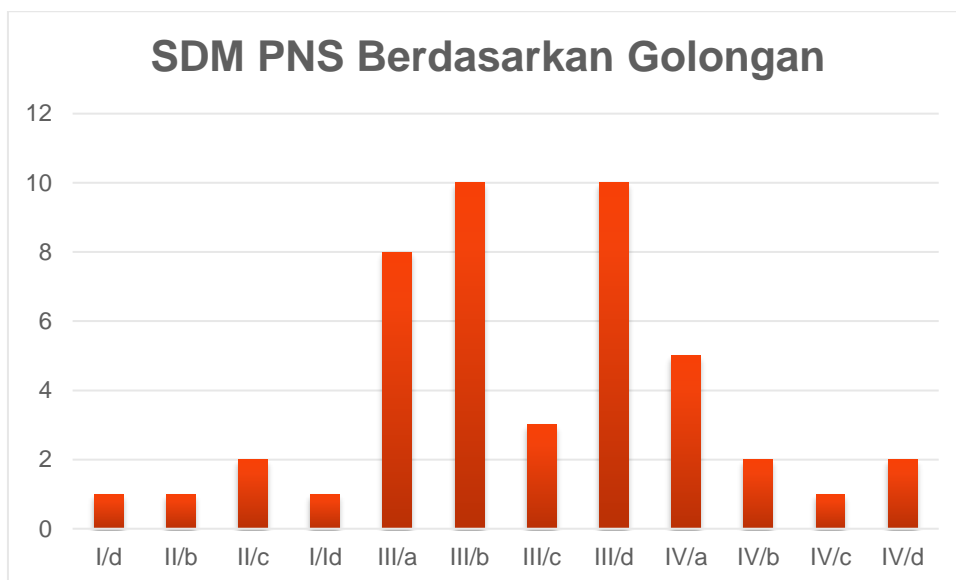
#### 3.1.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah PNS Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sampai akhir Tahun 2022 berjumlah 46 (empat puluh enam) orang yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang berjenis kelamin laki-laki dan 12 (dua belas) orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan golongan pegawai, pegawai BPLJ di dominasi oleh golongan III/b sejumlah 10 (sepuluh) orang dan golongan III/d sejumlah 10 (sepuluh). Data tersebut beserta pengelompokan lainnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

## SDM PNS Berdasarkan Gender



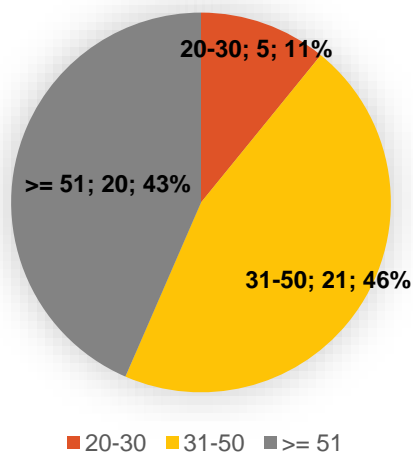
**Gambar 3.1** SDM PNS Berdasarkan Gender



**Gambar 3.2** SDM PNS Berdasarkan Golongan

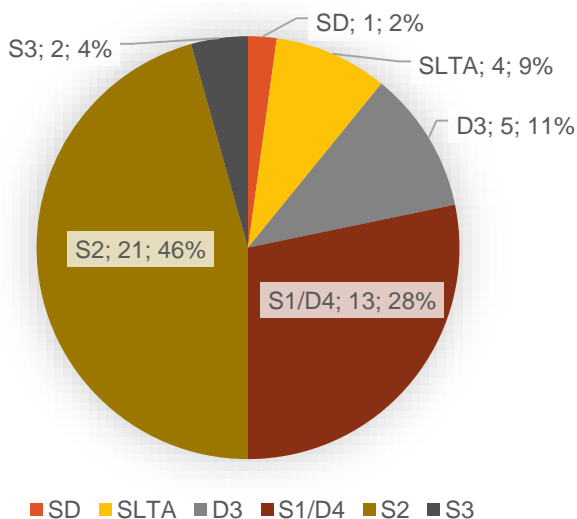
Komposisi PNS berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar 3.3. Sedangkan komposisi PNS Tahun 2022 berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3.4.

## SDM Berdasarkan Usia



**Gambar 3.3** SDM PNS Berdasarkan Usia

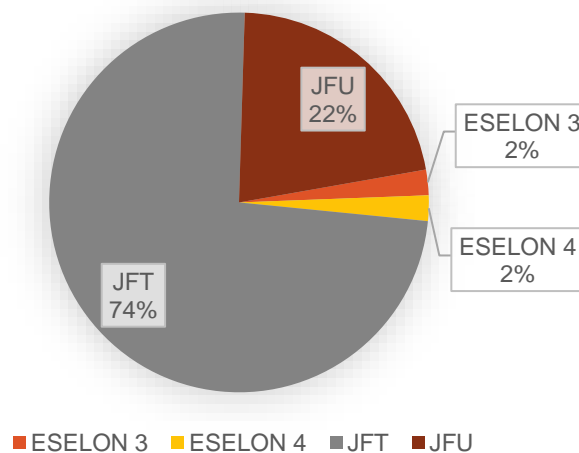
## SDM Berdasarkan Pendidikan



**Gambar 3.4** SDM PNS Berdasarkan Pendidikan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terdiri dari eselon 3 yaitu Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, eselon 4 yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha, serta 34 (tiga puluh empat) orang pegawai sebagai staf Jabatan Fungsional Teknis dan 10 (sepuluh) orang pegawai sebagai staf Jabatan Fungsional Umum. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.5.

## SDM Berdasarkan Jabatan

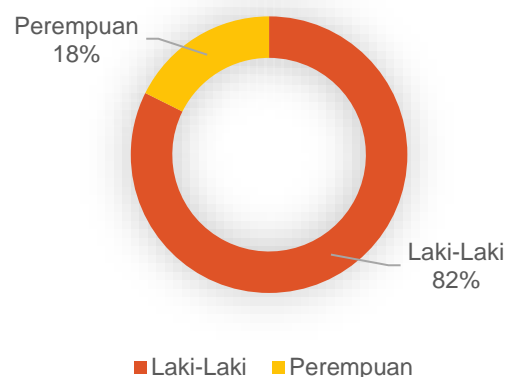


**Gambar 3.5** SDM PNS Berdasarkan Jabatan

### 3.1.2 Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)

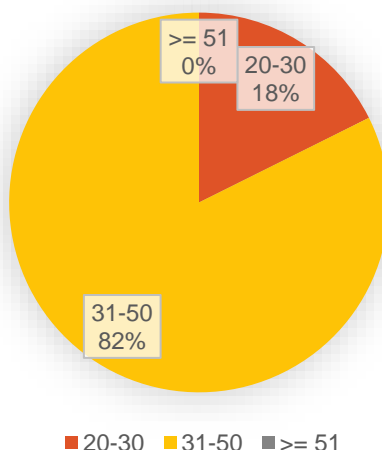
Jumlah Pegawai Non-PNS Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan total berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 14 (empat belas) orang berjenis kelamin laki-laki dan 3 (tiga) orang berjenis kelamin perempuan, yang dapat dilihat pada Gambar 3.6, sedangkan komposisi Pegawai Non-PNS Tahun 2022 berdasarkan usia terdiri dari 3 orang berusia 20-30 tahun (17%), dan 14 orang berusia 31-50 tahun (83%). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.7.

## SDM Non PNS Berdasarkan Gender



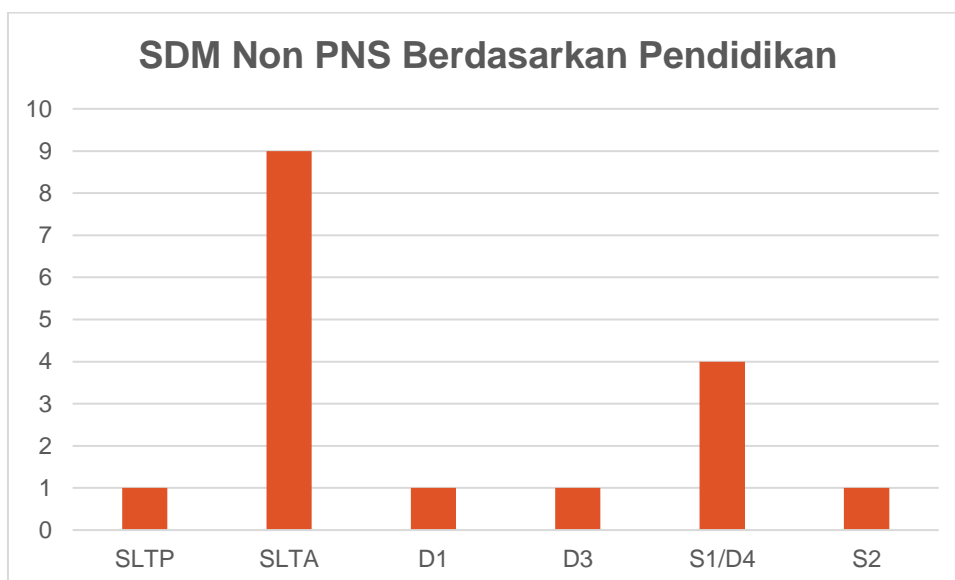
**Gambar 3.6** SDM Non PNS Berdasarkan Gender

## SDM Non PNS Berdasarkan Usia



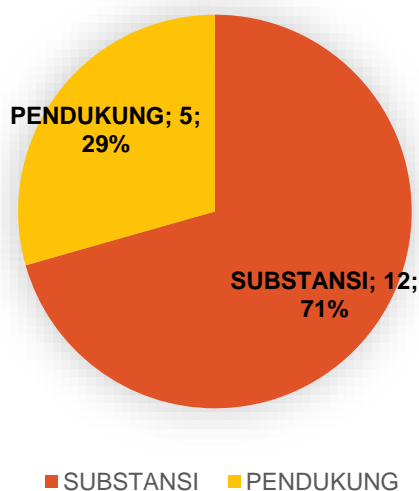
**Gambar 3.7** SDM Non PNS Berdasarkan Usia

Komposisi Pegawai Non-PNS Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 1 orang tingkat SLTP, 9 orang tingkat SLTA, 1 orang tingkat D3, 1 orang tingkat D1, 4 orang tingkat S1/D4 dan 1 orang tingkat S2 yang dapat dilihat pada Gambar 3.8 Sedangkan Komposisi Pegawai Non-PNS berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Gambar 3.9.



**Gambar 3.8** SDM Non PNS Berdasarkan Pendidikan

## SDM Non PNS Berdasarkan Jabatan

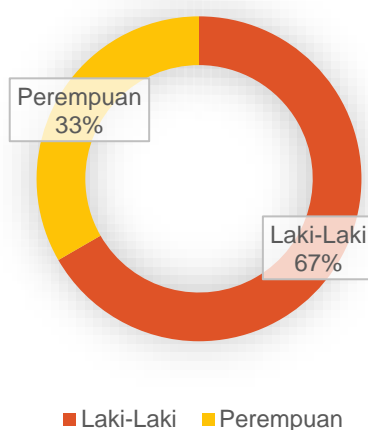


**Gambar 3.9** SDM Non PNS Berdasarkan Jabatan

### 3.1.3 Konsultan Individu

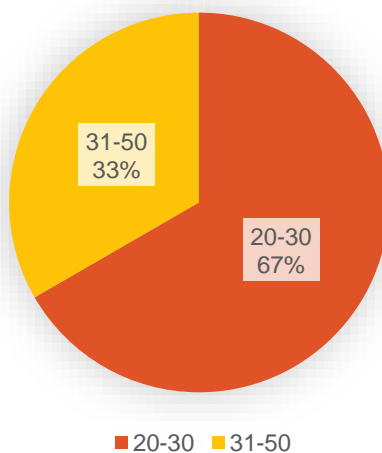
Jumlah Pegawai Konsultan Individu Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan total berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 (satu) orang berjenis kelamin perempuan, yang dapat dilihat pada Gambar 3.10, sedangkan komposisi berdasarkan usia terdiri dari 2 orang berusia 20-30 tahun dan 1 orang berusia 31-50 tahun. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.11. Dalam kategori Pendidikan, KI dengan jenjang S1 terdiri dari 1 (satu) orang dan S2 terdiri dari 2 (dua) orang yang dapat dilihat pada Gambar 3.12.

## SDM KI Berdasarkan Gender



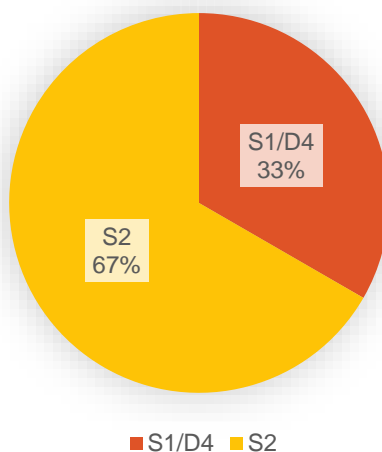
**Gambar 3.10** SDM KI Berdasarkan Gender

## SDM KI Berdasarkan Usia



**Gambar 3.11** SDM KI Berdasarkan Usia

## SDM KI Berdasarkan Pendidikan



**Gambar 3.12** SDM KI Berdasarkan Pendidikan

### 3.2 Sarana Prasarana

Aset BMN yang dimiliki Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dari Bulan Januari 2022 – Desember 2022 mencakup akun peralatan dan mesin (kode 132111). Adapun data rincian aset BMN Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan per bulan Desember dapat dilihat berdasarkan Tabel 3.1.



**Tabel 3.1** Rincian Aset BMN Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

No.	Kode Barang	Sub-Sub Kelompok Barang	Jumlah	Harga Perolehan	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	3.01.03.05.007	Pompa Angin	2	5.649.900	2	0	0
2	3.02.02.02.003	Kursi Roda	1	1.429.680	1	0	0
3	3.03.02.04.002	Dongkrak Hidrolik	2	11.266.500	2	0	0
4	3.03.02.05.019	Toolkit Perbengkelan	6	11.555.100	6	0	0
5	3.03.03.10.999	Alat Timbangan/Biara Lainnya	2	155.562.000	2	0	0
6	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	1	1.738.000	1	0	0
7	3.05.01.04.003	Rak Besi	18	67.732.940	18	0	0
8	3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1	3.135.750	1	0	0
9	3.05.01.04.007	Brandkas	1	8.827.500	1	0	0
10	3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	1	10.010.000	1	0	0
11	3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	4	15.378.000	4	0	0
12	3.05.01.05.017	Mesin Absensi	1	23.870.000	1	0	0
13	3.05.01.05.039	Display	3	18.645.000	3	0	0
14	3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	2	9.658.000	2	0	0
15	3.05.01.05.082	Mesin Fogging	3	5.730.000	3	0	0
16	3.05.01.05.088	Sirine	2	8.340.027	2	0	0
17	3.05.01.05.095	Wastafel Portable	3	4.662.000	3	0	0
18	3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	14	62.975.000	14	0	0
19	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	25	75.335.000	25	0	0
20	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	124	223.931.500	124	0	0
21	3.05.02.01.004	Kursi Kayu	6	10.800.300	6	0	0
22	3.05.02.01.008	Meja Rapat	3	15.238.080	3	0	0
23	3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	3	37.445.014	3	0	0
24	3.05.02.01.033	Sofa	4	25.396.500	4	0	0
25	3.05.02.03.005	Air Cleaner	17	42.887.000	17	0	0
26	3.05.02.04.001	Lemari Es	4	14.136.750	4	0	0

No.	Kode Barang	Sub-Sub Kelompok Barang	Jumlah	Harga Perolehan	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
27	3.05.02.04.004	A.C. Split	15	192.147.500	15	0	0
28	3.05.02.05.006	Oven Listrik	3	3.388.000	3	0	0
29	3.05.02.06.002	Televisi	7	135.850.000	7	0	0
30	3.05.02.06.007	Loudspeaker	5	180.075.650	5	0	0
31	3.05.02.06.014	Microphone	3	31.205.000	3	0	0
32	3.05.02.06.016	Mic Conference	11	50.088.500	11	0	0
33	3.05.02.06.017	Unit Power Supply	1	22.275.000	1	0	0
34	3.05.02.06.023	Timbangan Orang	1	3.348.000	1	0	0
35	3.05.02.06.033	Water Filter	2	45.672.000	2	0	0
36	3.05.02.06.034	Tangga Aluminium	5	9.268.500	5	0	0
37	3.05.02.06.036	Dispenser	2	2.859.360	2	0	0
38	3.05.02.06.037	Mimbar/Podium	1	3.407.700	1	0	0
39	3.05.02.06.045	Coffee Maker	2	15.713.500	2	0	0
40	3.05.02.06.072	Lampu	2	6.882.000	2	0	0
41	3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	1	2.585.000	1	0	0
42	3.06.01.01.098	Mixer Sound Sistem	1	4.026.000	1	0	0
43	3.06.01.02.061	Lensa Kamera	1	2.134.000	1	0	0
44	3.06.01.02.132	Video Conference	1	22.770.000	1	0	0
45	3.06.01.02.135	LCD Monitor	1	2.350.400	1	0	0
46	3.06.01.02.165	Camera Conference	1	8.002.500	1	0	0
47	3.06.01.02.167	Drone	1	81.950.000	1	0	0
48	3.06.01.04.045	Mesin Barcode	1	3.905.000	1	0	0
49	3.06.02.01.004	Telephone Mobile	2	30.241.000	2	0	0
50	3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	15	30.129.000	15	0	0
51	3.07.01.01.026	Tabung O2	3	5.970.000	3	0	0
52	3.08.01.06.057	Straight Edge	2	8.668.000	2	0	0
53	3.08.01.56.081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	1	8.613.000	1	0	0
54	3.09.04.02.031	Kamera Digital	6	15.850.800	6	0	0

No.	Kode Barang	Sub-Sub Kelompok Barang	Jumlah	Harga Perolehan	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
55	3.09.04.05.004	Alat Ukur Kecepatan Ranmor	6	24.475.500	6	0	0
56	3.10.01.02.001	P.C Unit	38	590.817.900	38	0	0
57	3.10.01.02.002	Laptop	14	349.907.800	14	0	0
58	3.10.01.02.003	Notebook	10	205.903.750	10	0	0
59	3.10.02.02.004	Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)	7	16.511.000	7	0	0
60	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	66.971.118	14	0	0
61	3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	16.258.000	3	0	0
62	3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	5	17.195.000	5	0	0
63	3.11.01.02.017	Penetrometer (Ukur/instrument)	2	4.972.000	2	0	0
64	3.19.01.02.001	Alat Tennis Meja	1	4.840.000	1	0	0
65	6.07.03.01.001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	2	611.224.638	2	0	0

### 3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Selama Tahun Anggaran 2022, terdapat 4 (empat) kali revisi anggaran. DIPA Awal tahun 2022 disahkan pada tanggal 17 November 2020, yang merupakan DIPA awal pada Satuan Kerja (Satker) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Komposisi DIPA Awal TA.2022 diantaranya RPM sebesar Rp. 11.929.184.000,- . Pagu terakhir Satuan Kerja (Satker) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebesar Rp. 11.179.184.000,- dengan komposisi seluruhnya RPM dapat dilihat pada Tabel 3.2. Kronologis perubahan DIPA Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan TA.2022 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Perubahan DIPA selama Tahun 2022 secara garis besar dilakukan berdasarkan kebutuhan kegiatan yang mendesak yang belum dialokasikan sebelumnya. Pagu anggaran tahun 2022 terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya akibat adanya kebijakan belanja barang dan modal diharuskan memiliki TKDN, sehingga terdapat beberapa kegiatan tertunda karena pembelian peralatan survei dan perbaikan harus mendatangkan barang dari luar negeri yang tidak memiliki TKDN. Selain ditanggungkannya pembelian alat survei impor dan perbaikan alat dengan mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri, Balai perkerasan dan lingkungan Jalan mencoba perbaikan alat dengan mengoptimalkan tenaga lokal.

Pada akhir tahun Balai perkerasan dan lingkungan Jalan mendapatkan tugas direktif untuk pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi test track di lingkungan kampus Dit BINTEK. Berdasarkan tugas tersebut diperlukan pengalokasian anggaran dari berbagai kegiatan untuk mendukung tugas tersebut dengan tidak mengurangi kualitas output kegiatan yang lain.

**Tabel 3.2** Alokasi Anggaran DIPA Satker BPLJ TA 2022

NO	UNIT KERJA	SUMBER DIPA			
		RPM	PHLN	SBSN	TOTAL
1	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	11.179.184.000	0	0	Rp 11.179.184.000
<b>JUMLAH</b>		<b>11.179.184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Rp 11.179.184.000</b>

**Tabel 3.3** Kronologis Perubahan DIPA Satker BPLJ TA 2022

NO	DIPA AWAL/ REVISI	NILAI DIPA AWAL/ SEMULA	JENIS REVISI					Kenaikan/ Penurunan	NILAI DIPA AKHIR/ MENJADI	ALASAN/PENYEBAB REVISI
			DJA	KANWIL	POK	DIGITAL STAMP	TANGGAL PENGESAHAN			
1	DIPA Awal	11.929.184.000	V			0677-9968-0260-1517	17/11/2021		11.929.184.000	
2	Revisi ke-1	11.929.184.000		V		3014-0919-0150-6330	02/09/2022	Tetap	11.929.184.000	- Alokasi anggaran untuk kegiatan tambahan perbaikan Alat Survei APT dan APKJ - Optimalisasi penggunaan anggaran
3	Revisi ke-2	11.929.184.000	V			3438-3020-4180-0011	27/10/2022	- 750.000.000	11.179.184.000	- Pengurangan anggaran untuk diserahkan pada Dit BINTEK JATAN untuk keperluan mendesak
4	Revisi ke-3	11.179.184.000		V		5813-8091-3930-8825	07/11/2022	Tetap	11.179.184.000	- Alokasi anggaran untuk kegiatan pemasangan perlengkapan jalan pada lokasi test track - Optimalisasi penggunaan anggaran
5	Revisi ke-4	11.179.184.000		V		7653-7063-0107-5050	28/11/2022	Tetap	11.179.184.000	- Optimalisasi anggaran dengan Pergeseran antar jenis belanja untuk mengakomodir kegiatan mendesak - Optimalisasi penggunaan anggaran

## BAB 4

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 4.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam mengukur capaian kinerja, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah menyusun rencana aksi yang dimonitoring melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagai bentuk monitoring terhadap pencapaian kinerja dan untuk meninjau hambatan-hambatan kinerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan/kegagalan program. Selain itu agar didapat pengukuran capaian kinerja yang SMART Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan juga menyusun SK Indikator Kinerja Utama internal yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan target internal Renstra BPLJ 2020-2024. Oleh karena itu, diharapkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat sepenuhnya tercapai. Capaian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan 2022 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai/diterbitkan/disampaikan dengan target sesuai indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Capaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan TA 2022 ditunjukkan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2.

**Tabel 4.1** Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program TA.2022

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM		SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</b>							
1	Rating Keselamatan Jalan Nasional						
	Parameter	Tingkat fasilitas pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100	100	100	
	Parameter	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Dok	1	1	100	
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>							
2	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		%	100	100	100	

**Tabel 4.2** Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN(%)		KET TERCAPAI /TIDAK
			AWAL (PK REVISI)	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</b>								
<b>IKP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>								
1	<b>ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan</b>	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	100	100	Tercapai
<b>Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>								
<b>IKP: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>								
2	<b>EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</b>	Layanan	1	1	1	100	100	Tercapai
3	<b>EBA 962 Layanan Umum</b>	Layanan	1	1	1	100	100	Tercapai
4	<b>EBA 994 Layanan Perkantoran</b>	Layanan	1	1	1	100	100	Tercapai
5	<b>EBB 951 Layanan Sarana Internal</b>	Unit	1	1	1	100	100	Tercapai

Sedangkan berdasarkan pengukuran kinerja internal BPLJ berdasarkan SK IKU BPLJ 2022 didapat hasil pengukuran kinerja yang ditunjukkan pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3** Capaian Kinerja IKU BPLJ 2022

No	Parameter	Pengukuran Parameter	Target Rensta BPLJ (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja TA 2022 (%)
1	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Persentase penyampaian teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	90	92,86	100
2	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	Persentase kepuasan pelanggan fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	85	91,87	100

Pada subbab ini dijelaskan mengenai hasil pengukuran kinerja tahun anggaran 2022 serta perbandingannya antara target revisi akhir dengan realisasi. Adapun rincian dari pencapaian Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan untuk TA. 2022 adalah sebagai berikut:

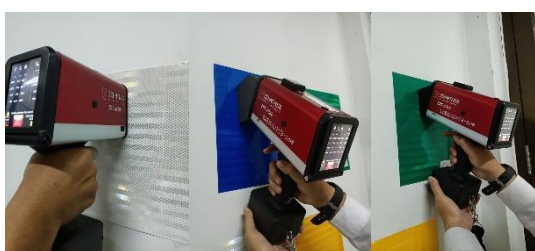
**A. Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan**

Indikator kinerja output yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

**1. Tingkat Fasilitas Pengujian Laboratorium dan Advis Teknik**

Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, BPLJ melaksanakan kegiatan layanan keteknikan di bidang perkerasan dan lingkungan jalan melalui kegiatan advis teknis, pendampingan teknis, dukungan survei kondisi jalan dan jembatan, kliring teknologi, layanan PNBP, serta layanan lainnya seperti narasumber maupun pembicara/instruktur.

Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan, pada tahun 2022 BPLJ menerima permintaan layanan teknis sejumlah 216 layanan. Setidaknya 40 layanan teknis berupa kegiatan advis teknis. Advis teknis yang dilakukan umumnya berupa pengecekan kerusakan atau keselamatan jalan, analisis pengujian survei kondisi jalan, serta kalibrasi alat survei. Sedangkan untuk kegiatan layanan teknis pengujian yang telah dilakukan pada tahun 2022 adalah sebanyak 18 layanan (PNBP dan Non PNBP) dengan total nilai PNBP sebesar Rp 116.310.500. Pengujian yang dilakukan antara lain pengujian kekesatan jalan, retroreflektif rambu, kekuatan jalan, kondisi permukaan jalan, dan pengukuran beban sumbu kendaraan. Sisa layanan teknis dilakukan melalui diskusi daring, pendampingan teknis, dan narasumber.



(a) Pengujian retroreflektif rambu



(b) Pengujian kekesatan jalan



(c) Pengukuran beban sumbu kendaraan



(d) Pengujian tekstur permukaan jalan

**Gambar 4.1** Dokumentasi Layanan Teknis



**Manfaat Kegiatan:**

- Membantu menyelesaikan permasalahan bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan di BB/BPJM seluruh Indonesia baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi maupun saat jalan tersebut telah beroperasi, sehingga secara teknis, penyelenggaraan jalan tersebut dapat melayani pengguna dengan baik
- Membantu stakeholder dalam melakukan survey/pengujian perkerasan jalan dalam rangka pemenuhan parameter perkerasan jalan yang dipersyaratkan.

**Kendala Kegiatan:**

- Keterbatasan SDM yang memiliki level kompetensi teknis yang lebih tinggi.
- Banyaknya undangan pembahasan online terkait layanan teknis dengan permasalahan tipikal dan pada level yang belum membutuhkan keterlibatan Balai Teknik
- Pengajuan kegiatan advis teknik dari pelanggan seringkali langsung menghubungi secara personal
- Informasi kegiatan advis teknik yang diterima oleh sekretaris BPLJ tidak seluruhnya diinfokan ke tim layanan teknis
- Proses kaji ulang permohonan dari pelanggan masih belum sesuai standar pelayanan

**Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif:**

- Peningkatan kompetensi teknis SDM BPLJ melalui pelaksanaan Inhouse training substansi teknis bidang perkerasan dan lingkungan jalan.
- Menginformasikan kepada pihak pelanggan untuk bersurat terlebih dahulu ke Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan
- Meminta kepada sekretaris BPLJ untuk berbagi informasi dengan tim layanan teknis
- Memperbaiki waktu proses kaji ulang agar sesuai dengan standar pelayanan

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:**

- Sudah adanya Kelompok Bidang Keahlian yang merupakan penugasan dari Bapak Dirjen, sehingga pembahasan terkait permasalahan teknis lapangan dilakukan oleh tim/personil yang benar-benar kompeten.
- Adanya keterbatasan SDM dan beberapa penugasan pimpinan (kecenderungan *overload*), sehingga terjadi keterbatasan dalam tingkat layanan.
- Sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang baik dan profesionalisme kerja.

### Rekomendasi untuk Perbaikan Tahun Selanjutnya:

- Tingkat permasalahan lapangan yang terjadi di BB/BPJN perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Direktorat Kompetensi masing-masing sebelum masuk ke Ditbintek/Balai Teknik
- Penentuan prioritas layanan
- Memperbaiki komunikasi antar personil, sistem pengarsipan, dan perlu meningkatkan profesionalisme kerja

Pada Tahun 2022 juga terdapat Layanan Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Pendukung Pengujian. Realisasi pencapaian kegiatan Layanan Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Pendukung Pengujian pada tahun ini telah tercapai 1 (satu) unit. Output dari kegiatan ini adalah paket pengadaan dalam satu tahun anggaran. Paket ini terdiri dari tiga akun belanja yang terdiri dari:

- a) Belanja Jasa Konsultan, dengan kegiatan Redokumentasi alat uji *Heavy Vehicle Simulator*.
- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dengan kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Alat *Heavy Vehicle Simulator* dan Alat Pengukur dan Kekuatan Jalan.
- c) Belanja Modal Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan penerapan percontohan perlengkapan pada jalan percobaan dan penerapan teknologi.

### Manfaat Kegiatan:

- Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pendukung Pengujian bermanfaat untuk pengelolaan peralatan yang dapat menunjang kinerja dari tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dan penerapan perlengkapan jalan sebagai percontohan (etalase) pada aspek keselamatan jalan, dengan rincian sebagai berikut:
  - Redokumentasi & Perbaikan Alat *Heavy Vehicle Simulator* (HVS) dan Alat Pengukur Kekuatan Jalan (APKJ) untuk mengetahui sistem mekanikal dan elektrikal alat *Heavy Vehicle Simulator* agar memudahkan proses pemeliharaan dan analisis perbaikan, mendukung pengujian struktur perkerasan jalan dengan skala 1:1 untuk mengetahui penurunan kondisi perkerasan jalan dengan waktu yang dapat dipercepat, dan mengevaluasi kondisi struktur perkerasan jalan dan umur sisa perkerasan.
  - Pengadaan Pelengkap Jalan Sebagai Penunjang Keselamatan Jalan sebagai percontohan (etalase) penerapan perlengkapan jalan yang berkeselamatan dan sebagai percontohan sistem drainase dengan memerhatikan aspek estetika lingkungan jalan

**Kendala Kegiatan:**

Kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan pendukung pengujian secara umum ada beberapa kendala, diantaranya:

- Alat *Heavy Vehicle Simulator* merupakan alat uji perkerasan skala 1:1 yang jarang dimiliki oleh berbagai stakeholder. Karena alat ini merupakan buatan Amerika, maka dari itu jika ada permasalahan pada tersebut perlu mendatangkan teknisi dari luar negeri dan memerlukan biaya yang besar. Terlebih komponen alat tersebut mayoritas impor dan terhalang aturan TKDN. Pada saat akhir tahun, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dapat bekerja sama dengan penyedia jasa dalam negeri yang sesuai kualifikasi yang dapat redokumentasi dan perbaikan alat HVS tersebut.
- Kendala dalam perbaikan Alat Pengukur Kekuatan Jalan (APKJ) yaitu tidak terencana nya kegiatan perbaikan alat tersebut dari awal tahun anggaran, sehingga perlunya revisi anggaran dari akun kegiatan lain.
- Kendala dalam Pengadaan Pelengkap Jalan Sebagai Penunjang Keselamatan Jalan yaitu tidak terencana nya kegiatan perbaikan alat tersebut dari awal tahun anggaran, sehingga perlunya revisi anggaran dari akun kegiatan lain. Dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak stakeholder yang terkait sehingga perencanaan dan koordinasi kurang maksimal. Kondisi cuaca yang tidak mendukung, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat.

**Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif:**

Berdasarkan kendala yang dihadapi diperlukan anggaran pemeliharaan rutin alat HVS dan APKJ agar kinerja alat tetap optimal dalam mendukung tugas dan fungsi. Kemudian diperlukan adanya *transfer knowledge* pengoperasian dan pemeliharaan peralatan pengujian agar senantiasa terjaga kondisinya. Pengadaan Pelengkap Jalan sebagai penunjang Keselamatan Jalan diperlukan adanya rencana kegiatan yang terstruktur sebelum pagu anggaran ditetapkan. Koordinasi secara berkala antara stakeholder terkait mengenai desain perlengkapan jalan yang diinginkan.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:**

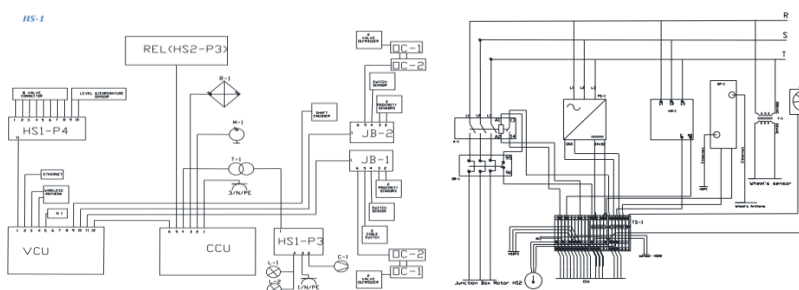
Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan tersebut. Faktor keberhasilan dalam kegiatan redokumentasi dan perbaikan alat HVS dikarenakan tersedianya anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan, tenaga ahli yang kompeten dibidangnya, koordinasi dan komunikasi antara owner dan penyedia jasa relatif lancar dan dukungan dari Manajemen Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan yang senantiasa mendorong keberhasilan kegiatan tersebut.

Adapun faktor keberhasilan dalam perbaikan APKJ diantara lain tersedianya anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan dan dukungan dari Manajemen Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan yang senantiasa mendorong keberhasilan kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan pengadaan perlengkapan jalan sebagai penunjang keselamatan jalan terdapat beberapa hal faktor keberhasilan dalam kegiatan tersebut diantaranya penambahan pekerja dan waktu kerja harian dalam mengejar progres kegiatan dan optimalisasi perencanaan desain teknis perlengkapan jalan dengan anggaran yang tersedia.

**Rekomendasi untuk Perbaikan Tahun Selanjutnya:**

Perlunya perencanaan anggaran setiap tahunnya untuk pemeliharaan dan perbaikan alat uji agar kondisinya tetap optimal dan diperlukan adanya rencana kegiatan yang terstruktur sebelum pagu anggaran ditetapkan.



**Gambar 4.2** Redokumentasi Sistem Alat *Heavy Vehicle Simulator* Tahun 2022



**Gambar 4.3** Dokumentasi Perbaikan Alat *Heavy Vehicle Simulator* Tahun 2022






**Gambar 4.4** Perbaikan Alat Pengukur Kekuatan Jalan (APKJ) Tahun 2022

## 2. Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan yang Dikembangkan

Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan yang dikembangkan di lingkungan BPLJ dilakukan melalui kegiatan Paket kerja Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan (PA) yang terdiri dari Subpaket kerja Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan, Kelompok bidang keahlian Teknik lalu lintas, Kelompok Bidang Keahlian lingkungan berupa kegiatan-kegiatan pengembangan teknologi, penyusunan pedoman, serta kajian-kajian terkait dengan bidang keteknikan perkerasan dan lingkungan jalan. Output Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan yang di kembangkan di BPLJ TA. 2022 yang dikeluarkan dapat dilihat pada **Tabel 4.4**.

**Tabel 4.4** Output Teknologi Bidang Jalan yang Di Kembangkan

No	Sub Paket Kerja	Output
1	<p><b>Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan</b></p>   	<p><b>Pedoman Pengembangan Sistem Manajemen Drainase Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft Pedoman Inventarisasi dan Inspeksi telah tersusun, dan telah dibahas dalam konsensus tahap pertama untuk selanjutnya dibahas dalam konsensus tahap kedua;</li> <li>- Draft Pedoman Inspeksi, Program Penanganan dan Estimasi Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pemeliharaan Drainase Jalan telah tersusun, menunggu pembahasan tingkat internal BPLJ untuk selanjutnya dibahas dalam konsensus;</li> <li>- Aplikasi survey123 untuk survei inventarisasi drainase jalan telah dibuat dan diujicobakan di lapangan dengan hasil memuaskan. Formulir digital untuk survei inventarisasi tersebut tinggal dimutakhirkan sesuai pembahasan konsensus tahap kedua;</li> <li>- Aplikasi survey123 untuk survei inspeksi rutin belum dilakukan pemutakhiran, menunggu pembahasan internal BPLJ dan konsensus untuk selanjutnya diujicobakan di lapangan</li> </ul> <p><b>Pedoman Pembangunan Jalan dan Mitigasi di Kawasan Hutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draft pedoman telah disusun melalui pembahasan bersama Narasumber di tingkat Balai dan telah diajukan di tingkat unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Sub Direktorat TPI untuk legalisasi</li> </ul> <p><b>Pedoman Penerapan Kriteria Kontruksi Berkelanjutan Bidang Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draf pedoman penerapan kriteria konstruksi berkelanjutan telah disusun dan perlu disempurnakan dan dilegalisasi melalui pembahasan di Direktorat Bina Teknik Jalan dan jembatan</li> </ul>

No	Sub Paket Kerja	Output
2	<p data-bbox="288 293 858 327"><b>Kelompok bidang keahlian Teknik lalu lintas</b></p>    	<p data-bbox="890 293 1495 349"><b>Kajian Kelandaian Tinggi /Pengecualian Desain Geometri</b></p> <ul data-bbox="890 353 1495 533" style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi batasan penggunaan nilai kelandaian untuk desain jalan sesuai fungsi jalan</li> <li>- Rekomendasi mitigasi untuk meningkatkan keselamatan pada jalan-jalan dengan kelandaian tinggi</li> </ul> <p data-bbox="890 544 1054 577"><b>Kajian ODOL</b></p> <ol data-bbox="890 582 1495 734" style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi mengenai antisipasi serta konsekuensi dari fenomena ODOL angkutan barang terhadap pemenuhan aspek keselamatan dan kelancaran pengguna jalan serta keamanan infrastruktur jalan</li> </ol> <p data-bbox="890 745 1495 801"><b>Pedoman Perencanaan Jalur Penghentian Darurat</b></p> <ul data-bbox="890 806 1495 902" style="list-style-type: none"> <li>- Telah ditetapkan pedoman teknis mengenai perencanaan Jalur penyelamat darurat untuk kendaraan truk lepas kendali</li> </ul> <p data-bbox="890 913 1495 969"><b>Pedoman Perencanaan Pagar Bukaan Median Darurat</b></p> <ul data-bbox="890 974 1495 1093" style="list-style-type: none"> <li>- Telah tersusun pedoman mengenai perencanaan teknis bukaan median darurat untuk jalan tol yang siap dibahas ditingkat balai</li> </ul> <p data-bbox="890 1104 1495 1137"><b>Pedoman Perencanaan Bantalan Benturan</b></p> <ul data-bbox="890 1142 1495 1238" style="list-style-type: none"> <li>- Telah tersusun pedoman mengenai perencanaan teknis bantalan benturan yang siap dibahas ditingkat balai.</li> </ul> <p data-bbox="890 1249 1495 1305"><b>Pedoman Pengumpulan Data Volume Lalu lintas (LHRT)</b></p> <ul data-bbox="890 1310 1495 1406" style="list-style-type: none"> <li>- Telah tersusun pedoman mengenai perencanaan pengumpulan data volume lalu lintas yang siap dibahas ditingkat Sub Dit</li> </ul> <p data-bbox="890 1417 1495 1473"><b>Pedoman Pengumpulan Data Beban Sumbu Kendaraan Dinamis (WIM)</b></p> <ul data-bbox="890 1478 1495 1597" style="list-style-type: none"> <li>- Telah tersusun pedoman mengenai perencanaan pengumpulan data beban sumbu kendaraan pada pos permanen yang siap dibahas ditingkat Sub Dit</li> </ul> <p data-bbox="890 1608 1495 1641"><b>Pedoman Desain Simpang Tak Sebidang</b></p> <ul data-bbox="890 1646 1495 1765" style="list-style-type: none"> <li>- Telah tersusun pedoman mengenai perencanaan perencanaan geometri simpang yang siap dibahas ditingkat Sub Dit</li> </ul>
3	<p data-bbox="288 1821 858 1854"><b>Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan</b></p>	<p data-bbox="890 1821 1286 1854"><b>Harmonisasi Spesifikasi Umum</b></p> <ul data-bbox="890 1859 1495 2000" style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Harmonisasi Spesifikasi Umum.</li> <li>- Tersusunnya rencana Outline Spesifikasi Umum yang telah siap dibahas</li> </ul>

No	Sub Paket Kerja	Output
		<p><b>Harmonisasi Manual Desain Perkerasan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusunnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Manual Desain Perkerasan.</li> <li>- Tersusunnya rencana Outline Manual Desain Perkerasan</li> </ul> <p><b>Pengembangan Aplikasi Software Desain Perkerasan Jalan (SDPJ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji coba (<i>public hearing</i>) kepada Satker P2JN seluruh Indonesia.</li> <li>- Satker P2JN bersama-sama dengan perwakilan KPIJ dari BBP2JN dan BP2JN beserta <i>core team</i> mencoba Aplikasi SDPJ 2.0 tersebut dengan menggunakan data-data real yang diperoleh di lapangan</li> </ul>

### Manfaat Kegiatan:

Kegiatan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan yang dikembangkan oleh BPLJ bermanfaat untuk menjawab isu-isu dalam bidang perkerasan dan lingkungan jalan terutama yang telah tertuang dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2019-2024. Berikut manfaat kegiatan yang dilaksanakan BPLJ pada TA. 2022.

- Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan
  - a. Adanya acuan yang akan menjadi dasar masukan bagi perencanaan dan penganggaran dalam penanganan drainase jalan dengan lebih efisien dan efektif, diharapkan mampu mewujudkan meningkatnya pemanfaatan fungsi drainase jalan yang lebih proporsional dan lebih baik;
  - b. Sebagai bahan acuan pelaksana dalam pembangunan jalan di Kawasan hutan sehingga terlaksana sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku;
  - c. Terdapat acuan bagi pelaksana dalam pembangunan jalan yang berkelanjutan
- Kelompok bidang keahlian Teknik lalu lintas
  - a. Peningkatan kinerja infrastruktur jalan, terutama dalam bidang keselamatan jalan yang diukur dari penurunan jumlah maupun tingkat fatalitas kejadian kecelakaan di jalan, serta penurunan waktu tempuh di jalan-jalan nasional untuk meningkatkan pergerakan ekonomi yang diukur dengan peningkatan ekonomi nasional.

- Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan
  - a. Tersedianya masukan terhadap harmonisasi spesifikasi umum dan manual desain perkerasan, konstruksi di bidang jalan dan jembatan yang akan digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan dokumen spesifikasi umum bina marga selanjutnya.
  - b. Membantu Satker P2JN dan Konsultan Perencana dalam desain perkerasan jalan agar lebih mudah dan akurat, yaitu dengan menyediakan 1 (satu) Aplikasi Desain Perkerasan Jalan (SDPJ) 2.0.

### **Kendala Kegiatan**

- Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan
  - a. Minimnya informasi terkait stakeholder/ pemegang kebijakan pembangunan jalan di Kawasan Hutan
  - b. Detail arah penyusunan pedoman yang belum jelas sehingga perlu memerlukan diskusi lebih lanjut agar pedoman dapat sesuai kebutuhan pelaksana/stakeholder pembangunan jalan di Kawasan hutan
  - c. Banyak terlibatnya anggota personil pada agenda kegiatan manajemen di Balai sehingga pelaksanaan kegiatan membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang telah di tentukan
  - d. Jadwal Narasumber yang padat menyebabkan pembahasan pedoman tertunda
  - e. Belum tersosialisasikan terkait Peraturan Menteri PUPR No 09 tahun 2021 sehingga para penyelenggara jalan masih belum memahami terkait aturan tersebut.
  - f. Belum teridentifikasinya secara jelas, data/dokumen yang diperlukan dalam pemenuhan kriteria yang diperlukan
  - g. Penyusunan pedoman-pedoman terkait drainase jalan telah selesai disusun, namun pembahasan secara internal dan narasumber belum bisa dilaksanakan terkendala kegiatan-kegiatan advis teknis, pelatihan survei inspeksi cara cepat drainase jalan, dan kegiatan-kegiatan internal Balai;
  - h. Penyusunan pedoman-pedoman tidak dapat didistribusikan ke anggota tim yang lain, mengingat masing-masing anggota tim mendapat penugasan yang lain;
  - i. Keterbatasan tim dalam menentukan Analisa Harga Satuan Pekerjaan menjadi kendala tersendiri mengingat kekurangan pengalaman tim dalam kegiatan fisik sehingga mengalami kesulitan perhitungannya;
  - j. Updating formulir survei digital terkendala server yang sering mengalami “error” sehingga mengalami kesulitan dalam updating aplikasi survei.



- Kelompok Bidang Keahlian Teknik lalu lintas
  - a. Kendala internal yang dihadapi terkait dengan jumlah sumber daya manusia/ anggota tim yang hampir seluruhnya memiliki beberapa tugas selain sebagai anggota tim KBK (rangkap jabatan) yang berpengaruh kepada kecepatan dan waktu pelaksanaan, terlambatnya proses administrasi yang berpengaruh terhadap keberangkatan serta pengurangan waktu pelaksanaan survei primer.
  - b. Kendala yang ditimbulkan pihak eksternal adalah banyaknya undangan untuk pembahasan yang jadwal pelaksanaannya sering mendadak sehingga diperlukan penyesuaian Kembali rencana kegiatan yang telah direncanakan dalam jadwal kegiatan.
- Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan
  - a. Rendahnya keterlibatan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan harmonisasi spesifikasi umum (Balai-balai Teknik Direktorat kompetensi, dan Direktorat Jalan Bebas Hambatan).
  - b. Belum jelasnya acuan desain perkerasan jalan yang akan diikuti.
  - c. Belum adanya data-data primer mengenai parameter mekanistik material perkerasan.
  - d. Kendala yang bersifat non teknis yaitu jadwal diskusi dengan narasumber dan uji coba ke BBPJK dan BPJK karena menyesuaikan kegiatan lainnya di BPLJ yang lebih prioritas

### **Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif**

- Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan
  - a. Memperkaya informasi terkait prosedur/SOP pembangunan jalan di Kawasan Hutan
  - b. Mendiskusikan target penyusunan pedoman dengan manajemen sehingga isi pedoman menjadi tepat sasaran dan sesuai kebutuhan
  - c. Melibatkan seluruh anggota tim dalam penyusunan pedoman melalui pembagian tugas dan peran yang jelas
  - d. Membuat jadwal pembahasan dengan Narasumber sesuai dengan waktu yang di sepakati
  - e. Tim melakukan koordinasi secara *online* maupun *offline* dengan direktorat terkait, serta dilakukan sosialisasi terkait peraturan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.

- f. Mengefektifkan waktu dalam penyusunan pedoman, mengoptimalkan anggota tim yang ada untuk membantu menyelesaikan pedoman serta memastikan server Bina Marga dengan intensif melakukan koordinasi dengan pengelola server Bina Marga.
- Kelompok Bidang Keahlian Teknik Lalu Lintas
  - a. Mengangkat Konsultan Individu untuk menambah SDM dalam pengerjaan pedoman untuk mengatasi kekurangan SDM yang rangkap jabatan
  - b. Banyaknya pertanyaan dari permintaan Zoom meeting yang terkadang sama dan mendasar, maka dengan membuat FAQ akan membantu mengurangi Zoom meeting karena penanya bisa mencari tahu dahulu jawabannya di FAQ
- Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan
  - a. BPLJ selaku koordinator selalu mengingatkan agar pembagian tugas dalam pengerjaan harmonisasi spesifikasi umum dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan permasalahan yang ada di spesifikasi umum yang terjadi saat ini.
  - b. Acuan desain perkerasan yang digunakan dibatasi pada metode Austroads, AASHTO, dan FHWA
  - c. Pengujian lapangan dan pengujian lab pada tahun 2023 untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam kegiatan harmonisasi MDP
  - d. Penyesuaian kembali jadwal kegiatan secara optimal.

#### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:**

- Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan
  - a. Kompetensi teknis tim terkait jalan di Kawasan hutan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas penyusunan draft pedoman
  - b. Kesibukan tim dengan tugas-tugas manajemen yang dapat menyebabkan waktu penyelesaian draft pedoman
  - c. Sulitnya mencari Narasumber/ahli/pakar ahli jalan di Kawasan hutan
  - d. Sumber literatur/Data sekunder terkait penerapan lintasan satwa di Kawasan hutan yang masih minim data
  - e. Kegiatan pelaksanaan penyusunan pedoman penerapan kriteria konstruksi berkelanjutan bidang jalan telah disusun sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan konstruksi melalui beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan umum, tahap pemrograman, tahap konsultansi konstruksi, dan tahap konstruksi (pembangunan dan pengoperasian pemeliharaan). Adanya penyebab terlambatnya penyelesaian

pedoman dikarenakan beberapa faktor seperti kesulitan dalam mengidentifikasi data/dokumen yang diperlukan dalam setiap kriteria, subkriteria, kompetensi dan kesibukan tim dalam penyusunan draft pedoman. Walaupun demikian, kendala-kendala tersebut masih bisa diantisipasi dengan mengoptimalkan waktu dan tenaga yang ada untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai target output kegiatan tahun 2022.

- f. Dalam penyusunan pedoman dan pembuatan aplikasi inventarisasi dan inspeksi rutin drainase jalan sebenarnya dapat diselesaikan sesuai jadwal, namun dalam prakteknya banyak hal-hal non teknis di luar kemampuan anggota tim untuk menyelesaikannya secara cepat. Ketidakmampuan mendistribusikan penyusunan pedoman menjadi hal utama dalam penyelesaian penyusunan pedoman. Masing-masing anggota tim mendapat penugasan yang lain sehingga sulit mendistribusikan dalam penyusunan pedoman. Walaupun demikian, kendala-kendala tersebut masih bisa diantisipasi dengan mengoptimalkan waktu dan tenaga yang ada untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai target output kegiatan tahun 2022. Masalah error untuk server Bina Marga sebagai tempat penyimpanan data hasil survei memang di luar kemampuan tim. Sebagai solusinya dilakukan koordinasi secara intensif dengan pengelola server di Bina Marga.
- Kelompok Bidang Keahlian Teknik lalu lintas
    - a. Penerapan nilai kelandaian tinggi hanya dapat diterapkan pada jalan perintis dengan volume lalu lintas rendah selama umur rencana jalan, dan harus ditingkatkan apabila terjadi perubahan volume lalu lintas maupun pengembangan wilayah.
    - b. Penerapan relaksasi kebijakan zero ODOL akan meningkatkan kebutuhan biaya preservasi jalan, karena hampir keseluruhan kendaraan barang yang beroperasi di jalan melakukan tindakan overload.
    - c. Pedoman perencanaan jalur penghentian darurat tidak mengatur proses operasional serta pemeliharaan JPD.
  - Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan
    - a. Pada TA 2021, pengembangan SDPJ 2.0 mulai dilaksanakan dengan menambahkan modul-modul baru, dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap MDP 2017 dan Suplemen MDP 2020. Untuk modul-modul *Overlay* Perkerasan Kaku di Atas Perkerasan Lentur dan *Overlay* Perkerasan Lentur di Atas Perkerasan Kaku belum terdapat di MDP, namun karena kebutuhan di lapangan, kedua modul tersebut ditambahkan di Aplikasi SDPJ 2.0

- b. Pada TA 2022, dilakukan uji coba (*public hearing*) kepada BBPJJN dan BPJJN seluruh Indonesia sebagai pengguna Aplikasi SDPJ 2.0 tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan sekaligus sebagai sarana uji coba aplikasi tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan validasi dengan membandingkan hasil perhitungan aplikasi dengan perhitungan Excel. Jika sudah sesuai, tahap akhir yang dilakukan adalah *launching* Aplikasi SDPJ 2.0.

### Rekomendasi untuk Perbaikan Tahun Selanjutnya

- Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan
  - a. Untuk penyempurnaan aplikasi dan implementasi pengembangan sistem manajemen drainase jalan adalah sebagai berikut:
    - 1) Diperlukan jam terbang yang tinggi bagi surveyor untuk bisa menilai kondisi drainase jalan secara akurat dengan menambah pengalaman survei lapangan di lokasi dengan karakteristik saluran drainase yang berbeda-beda;
    - 2) Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Drainase Jalan, perlu dikembangkan aplikasi drainase jalan berbasis ArcGIS dengan platform Android/iOS sehingga bisa digunakan sesuai kebutuhan;
    - 3) Untuk mendorong agar aplikasi Sistem Informasi Manajemen Drainase Jalan digunakan oleh penyelenggara jalan, maka diperlukan dorongan dari penentu kebijakan khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga baik berupa Surat Edaran atau payung hukum lainnya
  - b. Untuk pedoman pembangunan jalan dan mitigasi di Kawasan hutan adalah:
    - 1) Perlunya studi banding atau kunjungan lapangan ke lokasi penerapan lintasan satwa di Kawasan hutan konservasi untuk menguatkan data dan informasi dalam draft pedoman.
    - 2) Meningkatkan kompetensi teknis tim dengan mengikuti Bimtek yang diselenggarakan KLHK tentang pembangunan jalan di Kawasan Hutan.
    - 3) Melakukan studi literatur yang lebih mendalam agar dihasilkan pedoman yang lebih komprehensif.
  - c. Untuk pedoman penerapan kriteria konstruksi berkelanjutan bidang jalan
    - 1) Pedoman penerapan kriteria konstruksi berkelanjutan dapat digunakan oleh seluruh stakeholder di Indonesia dalam rangka mendukung dan memberi masukan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap pembangunan jalan yang berkelanjutan
- Kelompok bidang keahlian Teknik lalu lintas

- a. Penyusunan kajian dan rekomendasi teknis sebaiknya dikelompokkan berdasarkan isu dan skala prioritas untuk mengantisipasi kegiatan direktif dan layanan yang tidak terencana sebelumnya.
  - b. Menyusun daftar isu yang sering dipertanyakan (frequently ask question/ FAQ) pada berbagai media yang dimiliki BPLJ untuk mengurangi alokasi waktu yang diperlukan dalam kegiatan layanan.
  - c. Penambahan sumber daya manusia (SDM) diluar balai untuk membantu pencapaian penyusunan kajian dan rekomendasi teknis.
  - d. Dukungan sistem administrasi yang lebih baik dalam proses pelaksanaan penyusunan luaran kegiatan.
  - e. Pembatasan jumlah tugas (rangkap jabatan) serta penambahan tenaga bantu/ konsultan perorangan
- Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan
- a. Penyusunan spesifikasi umum membutuhkan data-data serta kajian-kajian saintifik yang dapat digunakan untuk menunjang kebijakan atau spesifikasi yang akan digunakan. Kesesuaian antara spesifikasi dengan trend yang ada di lingkungan juga perlu dipertimbangkan.
  - b. Untuk penyusunan draft Manual Desain Perkerasan Jalan Hasil Harmonisasi maka aspek-aspek yang terdapat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) perlu dimasukkan ke dalam dokumen tersebut. Penyusunan Draft MDP hasil harmonisasi dapat mengikuti outline yang telah disusun pada kegiatan tahun ini. Pengujian lapangan dan pengujian laboratorium diperlukan dalam penyusunan Draft MDP hasil harmonisasi agar didapatkan parameter desain yang sesuai dengan kondisi di laboratorium dan lapangan.
  - c. Aplikasi SDPJ 2.0 diharapkan bisa diimplementasikan oleh BBPJN dan BPJN beserta Satker dan *Core Team* di seluruh Indonesia secara kontinu sehingga membantu dalam desain perkerasan jalan. Aplikasi SDPJ 2.0 sebaiknya dikembangkan berbasis *website* agar bisa disediakan *database* jalan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Untuk jangka panjang, aplikasi SDPJ 2.0 ini diharapkan bisa disosialisasikan dan diimplementasikan juga oleh konsultan, kontraktor, dan akademisi.

## **B. Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR**

### **1. EBB 951- Layanan Perkantoran**

Layanan Perkantoran di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mencakup Kegiatan Operasional Perkantoran (PJ), Belanja Uang Lembur (PH), dan Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana (PI) untuk melayani kebutuhan balai dalam rangka menunjang tugas dan fungsi balai. Target Output Layanan Perkantoran pada Tahun 2022 adalah (satu) 1 layanan dalam satu tahun anggaran. Realisasi pencapaian kegiatan Layanan Perkantoran pada Tahun 2022 telah tercapai 1 (satu) layanan, karena telah terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran, serta ketepatan dan kelancaran pembayaran belanja lembur pegawai dalam menunjang kinerja balai, dan terpenuhinya sarana dan prasarana rumah tangga dan perkantoran yang berfungsi dengan baik, serta lancar dan nyaman bagi seluruh kegiatan perkantoran sesuai dengan anggaran selama periode waktu satu tahun untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Adapun Kegiatan Layanan Perkantoran terdiri dari (1) Kegiatan Belanja Uang Lembur Pegawai dan (2) Kegiatan Operasional Perkantoran yang meliputi:

1. Belanja Keperluan Perkantoran, meliputi belanja sehari-hari perkantoran seperti kebutuhan air minum mineral, jamuan rapat, hidangan tamu, dan lain-lain;
2. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, meliputi pembayaran honorarium KPA, PPK, SPM, Bendahara, dan Pengelola Keuangan;
3. Belanja Barang Operasional Lainnya, meliputi pembayaran honorarium lembur PPNPN; dan
4. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, meliputi pengadaan belanja barang berupa Alat Tulis Kantor.

Sementara (3) Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana yang dapat diakomodir diantaranya:

1. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, meliputi belanja persediaan untuk pemeliharaan seperti lampu bohlam, kunci, cat;
2. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, meliputi pemeliharaan Gedung dan bangunan seperti pengecatan, perbaikan kondisi, dan lain-lain; dan
3. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, meliputi belanja pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan survei, dan lain-lain yang terdaftar dalam barang milik negara.

### **Manfaat Kegiatan:**

- Kegiatan Belanja Uang Lembur Pegawai bermanfaat sebagai penunjang kinerja pegawai agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta mengapresiasi pegawai yang telah bekerja melebihi jam kerja pegawai dengan membayarkan uang lembur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Kegiatan Operasional Perkantoran bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran dalam menunjang kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan; dan
- Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana bermanfaat untuk menjamin kelancaran fungsi dan operasional sarana prasarana perkantoran, sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja dan membantu pencapaian kualitas output yang tinggi; serta menjamin mobilisasi pegawai terjamin aman, layak, dan nyaman.

### **Kendala Kegiatan:**

Kegiatan Layanan Perkantoran yang berhubungan dengan belanja uang lembur pegawai secara umum tidak mengalami kendala, hanya saja penyesuaian penghitungan jam kerja yang harus menyesuaikan titik koordinat dan foto absensi dengan Aplikasi Bravo yang harus sesuai dengan titik koordinat di kantor. Apabila tidak sesuai, maka akan ada kebijakan khusus dalam perhitungan jam kerja pegawai.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Perkantoran meliputi:

- Pengurangan pagu anggaran, sehingga kebutuhan sehari-hari perkantoran tidak terpenuhi secara optimal;
- Keterlambatan pembayaran honor operasional satker dikarenakan perubahan SK Kesatkeran; dan
- Absensi masih menggunakan aplikasi online sehingga waktu pelaksanaan lembur pegawai PPNP tidak akurat.

Sementara kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana diantaranya:

- Keterlambatan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan dan/atau perbaikan dikarenakan perencanaan dan anggaran, permasalahan teknis, kondisi cuaca, serta

sumber daya manusia/teknisi yang terampil dan menguasai mengenai pemeliharaan utilitas (air kotor, air bersih, kelistrikan) dan konstruksi bangunan.

- Kesulitan identifikasi kerusakan aset bangunan/gedung, peralatan kantor dan kendaraan dikarenakan kondisi aset yang sudah lama.

#### **Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif:**

- Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam Kegiatan Belanja Uang Lembur Pegawai, diperlukan langkah antisipatif berupa pembaharuan/upaya validasi Aplikasi Bravo dengan GPS (*Global Positioning System*) sesuai titik koordinat kantor untuk setiap pegawai yang melaksanakan kegiatan lembur.
- Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam Kegiatan Operasional Perkantoran, diperlukan beberapa alternatif pemecahan masalah meliputi:
  - Penambahan pagu anggaran untuk kebutuhan operasional perkantoran di tahun anggaran berikutnya;
  - Pembuatan SK Kesatkeran disesuaikan dengan tanggal TMT SK Menteri PUPR dan SK Direktur Jenderal Bina Marga; dan
  - Pemberlakuan absen *finger print* atau absensi *face print* untuk keakuratan data kelebihan jam kerja PPNPN.
- Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana, diperlukan beberapa alternatif solusi, diantaranya:
  - Penyusunan rencana yang lebih terperinci dari awal tahun, baik teknis maupun anggaran dengan cara melakukan kegiatan diskusi, koordinasi dan kontrak kerjasama sedini mungkin walaupun kegiatan dilakukan jauh setelahnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi ketidaksesuaian rencana dari sisi teknis yang masih berpotensi terjadi karena kondisi bangunan yang memasuki batas usia pelayanan dan mengalami banyak kerusakan dan atau penurunan fungsi.
  - Pemeriksaan kondisi struktur bangunan/gedung kepada pihak yang kompeten untuk mengetahui kondisi secara lebih pasti yang selanjutnya dapat membantu estimasi biaya yang harus dikeluarkan sebagai dasar penyusunan anggaran.

#### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:**

- Penyebab terkendalanya Kegiatan Belanja Uang Lembur Pegawai adalah terjadinya perbedaan kesesuaian absensi, diantaranya titik koordinat GPS yang berbeda dengan keberadaan lokasi foto pegawai yang melaksanakan kegiatan lembur di kantor



- Penyebab terkendalanya Kegiatan Operasional Perkantoran Pegawai adalah Perubahan SK Kesatkeran, sehingga dibutuhkan penyesuaian untuk setiap kegiatan operasional
- Penyebab terkendalanya Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana, diantaranya: terjadinya penyesuaian dan pergeseran jadwal serta alokasi sumber daya manusia karena penyesuaian prioritas dengan adanya pekerjaan penugasan direktif; terjadi ketidakcocokan rencana kegiatan pemeliharaan dan/atau perbaikan dengan realisasi baik anggaran maupun pilihan teknik penyelesaian dari masalah kerusakan prasarana yang diperkirakan telah sesuai; serta kondisi cuaca buruk dengan musim hujan yang panjang menjadi hambatan untuk pekerja melakukan pekerjaan dengan baik dalam waktu yang direncanakan. Pengantaran serta pengadaan bahan dan penyelesaian bangunan memerlukan waktu yang lebih panjang.

### **Rekomendasi untuk Perbaikan Tahun Selanjutnya:**

Berikut beberapa rekomendasi yang diburuhkan untuk perbaikan pada Kegiatan Layanan Perkantoran, diantaranya diperlukan:

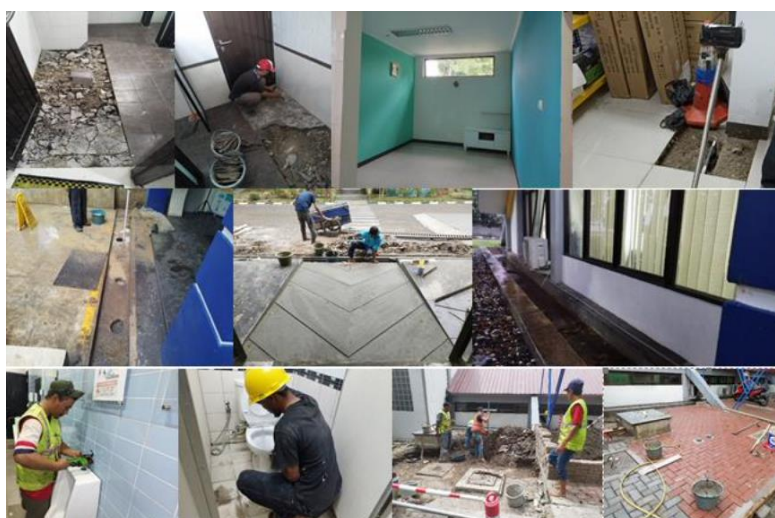
- Optimalisasi proses administrasi yang tepat diantaranya diperlukan pemeriksaan ulang setiap pergantian skema pembayaran, atau pun perubahan berkas yang tidak dilanjutkan. Pemeriksaan tersebut minimal dilakukan disetiap awal bulan sebagai bagian dari evaluasi.
- Perencanaan kebutuhan operasional perkantoran setiap bulannya sehingga dapat terukur kebutuhan anggaran yang diperlukan dan memaksimalkan jam kerja bagi pegawai PPNPN, sehingga kelebihan jam kerja bisa diminimalisir.
- Perencanaan yang lebih terperinci dari awal tahun, baik teknis maupun anggaran dengan cara melakukan kegiatan diskusi, koordinasi dan kontrak kerjasama sedini mungkin walaupun kegiatan dilakukan jauh setelahnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi ketidaksesuaian rencana dari sisi teknis yang masih berpotensi terjadi karena kondisi bangunan yang memasuki batas usia pelayanan dan mengalami banyak kerusakan dan atau penurunan fungsi.



**Gambar 4.5** Pembayaran Belanja Uang Lembur Tahun 2022



**Gambar 4.6** Belanja Sehari-hari Perkantoran Tahun 2022



**Gambar 4.7** Pemeliharaan Gedung Balai dan Laboratorium Tahun 2022

## 2. EBB-951 Layanan Sarana Internal

Output Layanan Sarana Internal mencakup Kegiatan Pengadaan Kantor dan Laboratorium (PG). Target Output Layanan Sarana Internal pada Tahun 2022 adalah (satu) 1 layanan dalam satu tahun anggaran. Realisasi pencapaian output Layanan Sarana Internal Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2022 tercapai 1 (satu) unit dalam 1 (satu) tahun anggaran karena telah terpenuhinya pengadaan untuk fasilitas perkantoran dan laboratorium untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai perkerasan dan Lingkungan Jalan. Kegiatan Layanan Sarana Internal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

### **Manfaat Kegiatan:**

Kegiatan Kegiatan Pengadaan Kantor dan Laboratorium bermanfaat untuk menunjang tugas dan fungsi dari balai itu sendiri dengan menyediakan peralatan yang diperlukan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### **Kendala Kegiatan:**

Kegiatan Pengadaan Kantor dan Laboratorium yang berhubungan dengan proses pengadaan secara umum tidak mengalami kendala. Kebijakan terkait pembelanjaan anggaran yang memerlukan syarat nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi kendala untuk memenuhi beberapa peralatan yang diperlukan oleh Balai Perkerasan dan lingkungan Jalan yang mengharuskan menggunakan alat impor (Non TKDN).

### **Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif:**

Berdasarkan kendala yang dihadapi, maka untuk tahun anggaran selanjutnya bisa dilakukan dengan mencari alat produksi lokal atau merupakan produk dalam negeri atau yang bisa memenuhi syarat dari nilai TKDN dengan fungsi sebanding.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:**

Penyebab terkendalanya Kegiatan Pengadaan Kantor dan Laboratorium adalah tender lelang pengadaan alat survei belum dapat dilakukan dikarenakan alat yang dibeli merupakan barang impor. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. PB.01.01-Mn/2775 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR, diperlukan izin untuk melakukan pengadaan barang impor.

### Rekomendasi untuk perbaikan tahun selanjutnya:

Beberapa saran yang dibutuhkan untuk proses pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk proses pengadaan yang berkaitan dengan kebutuhan alat khusus yang memerlukan impor atau nilai dari TKDN yang belum memenuhi sementara alat tersebut menunjang tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, maka sebaiknya dilakukan pembuatan Justifikasi Teknis mengenai kebutuhan tersebut.



**Gambar 4.8** Pengadaan Pendukung Perkantoran Tahun 2022

### 3. EBA 962- Layanan Umum

Output Layanan Umum mencakup Administrasi Kesatkeran (PK) dan Operasional Pimpinan (PL). Target Output Layanan Umum pada Tahun 2022 adalah (satu) 1 layanan dalam satu tahun anggaran. Realisasi output layanan Umum adalah 1 Layanan, karena telah terpenuhinya kebutuhan operasional pimpinan dan kebutuhan operasional kegiatan kesatkeran sesuai dengan anggaran selama periode waktu 1 (satu) tahun untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi dari Balai perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Kegiatan Administrasi Kesatkeran dimaksudkan untuk melayani kebutuhan operasional kegiatan kesatkeran dalam rangka menunjang efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Paket ini terdiri dari 6 (enam) akun belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa, pembiayaan kebutuhan para petugas kesatkeran dalam rangka perjalanan dinas luar kota;
2. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota, pembiayaan kebutuhan petugas satker dalam rangka koordinasi dalam kota dengan KPPN setempat, perpajakan, dan perbankan;
3. Belanja Sewa, penyediaan kendaraan pada saat melakukan perjalanan dinas;

4. Honor Output Kegiatan, berupa honorarium untuk pejabat pengadaan dan penanggung jawab e-monitoring;
5. Belanja Bahan, pembiayaan untuk kegiatan rapat dengan pihak yang terkait kesatkeran Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan;
6. Belanja Persediaan Barang Konsumsi, untuk pemenuhan ATK sebagai pendukung kesatkeran.

Kegiatan Operasional Pimpinan dimaksudkan untuk melayani kebutuhan operasional pimpinan dalam rangka menunjang efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Paket ini terdiri dari 3 (tiga) akun belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa, pembiayaan kebutuhan pelaksanaan pimpinan dalam rangka perjalanan dinas luar kota.
2. Belanja Sewa, penyediaan kendaraan operasional pimpinan dan kantor sebanyak 3 buah kendaraan.

**Manfaat Kegiatan:**

- Kegiatan Administrasi Kesatkeran bermanfaat untuk melayani kebutuhan operasional kegiatan kesatkeran untuk menunjang efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kegiatan Operasional Pimpinan bermanfaat untuk melayani kebutuhan operasional pimpinan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**Kendala Kegiatan:**

Berbeda dengan tahun sebelumnya, kegiatan yang berhubungan dengan administrasi kesatkeran dan operasional pimpinan secara umum tidak mengalami kendala akibat masa pandemi Covid-19, akan tetapi terkendala pada pengoperasian Aplikasi SAKTI. Tahun anggaran 2022 merupakan tahun pertama dalam penggunaan Aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Terdapat beberapa kendala teknis dalam pengoperasiannya diantaranya:

- Untuk Kegiatan Administrasi Kesatkeran, proses pengadaan untuk bahan pendukung ATK belum bisa dilaksanakan di awal tahun dikarenakan adanya penyesuaian

penggunaan Sistem Bela Pengadaan, sehingga kebutuhan bahan dokumen kegiatan kesatkeran tertunda.

- Untuk Kegiatan Operasional Pimpinan, pencatatan realisasi dilakukan secara aktual. Dalam pencatatan tersebut terjadi pengulangan pencatatan yang mengakibatkan sisa pagu hampir mencapai 100%, akan tetapi secara aktual, capaian realisasi baru 71%, sehingga di akhir tahun dana tidak terserap sebesar 28% akibat pencatatan ganda.

**Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif:**

1. Untuk Kegiatan Administrasi Kesatkeran, diperlukan realisasi pengadaan ATK diawal tahun dimana proses pengadministrasiannya masih mengikuti SK Tim Kesatkeran tahun sebelumnya selama masih belum ada SK terbaru, serta persiapan user pengguna Sistem Bela Pengadaan dari LKPP.
- Untuk Kegiatan Operasional Pimpinan, diperlukan pemeriksaan ulang setiap pergantian skema pembayaran, atau pun perubahan berkas yang tidak dilanjutkan. Pemeriksaan tersebut minimal dilakukan disetiap awal bulan sebagai bagian dari evaluasi.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:**

- Penyebab terkendalanya Kegiatan Administrasi Kesatkeran adalah adanya rekomendasi penggunaan Sistem Bela Pengadaan dari LKPP, sehingga diperlukan persiapan untuk user pengguna sistem tersebut.
- Penyebab terkendalanya Kegiatan Operasional Pimpinan adalah pencatatan ganda realisasi kegiatan yang dilakukan secara aktual pada Aplikasi SAKTI, dikarenakan perubahan skema pembayaran, skema awal menggunakan uang persediaan berubah menjadi rampung.

**Rekomendasi untuk perbaikan tahun selanjutnya:**

- Proses pengadaan yang berkaitan dengan kebutuhan ATK harus direalisasikan pada awal tahun anggaran, sehingga kebutuhan dari Tim Kesatkeran bisa terpenuhi.
- Pengoptimalan proses administrasi yang tepat diantaranya diperlukan pemeriksaan ulang setiap pergantian skema pembayaran, atau pun perubahan berkas yang tidak dilanjutkan. Pemeriksaan tersebut minimal dilakukan disetiap awal bulan sebagai bagian dari evaluasi.



**Gambar 4.9** Dokumentasi Perjalanan Dinas Pimpinan

#### **4. EBA 960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal**

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mencakup Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan (PM). Target Output Layanan Perkantoran pada Tahun 2022 adalah (satu) 1 layanan dalam satu tahun anggaran. Realisasi output Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal adalah 1 (satu) Layanan, karena telah terpenuhinya layanan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Kegiatan pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Komunikasi Publik (Kehumasan), Pembangunan Zona Integritas, dan Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko.

##### **Manfaat Kegiatan:**

Dengan adanya Kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal ini bermanfaat untuk menunjang salah satu tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

Lebih rinci, manfaat kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengelolaan aset BMN dan barang persediaan dengan baik dan tertib administrasi;
2. Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian dan terpenuhinya kebutuhan peningkatan kompetensi bagi seluruh pegawai BPLJ; serta terlaksananya kegiatan komunikasi publik dan kehumasan melalui media sosial tersampainya informasi kegiatan dan edukasi kepada masyarakat kaitannya tugas dan fungsi BPLJ;
3. Terlaksananya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BPLJ;
4. Penerapan manajemen risiko secara komprehensif dan mendukung penilaian maturitas SPIP Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### **Kendala Kegiatan:**

1. Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)  
Perubahan SK Kesatkeran, sehingga personil yang ditunjuk merupakan personil baru yang masih membutuhkan pelatihan baik dalam hal teori dan praktik mengenai pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan aset BMN dan barang persediaan.
2. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Komunikasi Publik (Kehumasan)  
Untuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai masih dilakukan secara *distance learning*, sehingga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) masih dirasakan kurang optimal untuk setiap pegawai. Sementara kendala terkait pelaksanaan komunikasi publik (kehumasan), diantaranya:
  - a. Belum diterapkannya perencanaan konten media sosial oleh pengampu bidang komunikasi dan pelayanan publik, yang seharusnya dapat menjadi acuan dan memudahkan dalam pengelolaan media sosial;
  - b. Ketidaksesuaian perencanaan konten media sosial dengan jadwal tayang pada media sosial, dikarenakan terkendala perangkat fasilitas penunjang yang kurang mumpuni;
  - c. Laporan pengelolaan media sosial belum menjadi perhatian untuk bahan evaluasi dan strategi perbaikan pada bulan-bulan selanjutnya; dan
  - d. Belum terdapat tenaga ahli khusus kehumasan, karena pekerjaan antara komunikasi publik dan kehumasan sebaiknya ditangani oleh petugas yang berbeda.



3. Pembangunan Zona Integritas
  - a. Penyampaian jadwal penilaian Zona Integritas yang tentatif;
  - b. Kebutuhan SDM yang bersamaan dengan kegiatan proses bisnis balai; dan
  - c. Alur SOP balai belum sepenuhnya tersusun dan belum semua diterapkan sesuai prosedur.
4. Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko
 

Untuk penerapan SPIP, dalam mendukung penilaian maturitas, diharuskan untuk menyiapkan dokumen pendukung penerapan SPIP, namun pada realisasinya dokumen tersebut tidak semua tersedia, sehingga dibutuhkan waktu lebih untuk menyiapkan dokumen tersebut. Sementara untuk penyusunan dokumen manajemen risiko masih dianggap sebagai pemenuhan formalitas dan belum dilakukan secara komprehensif.

**Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif:**

1. Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
 

Diperlukan pelatihan, baik dalam hal teori maupun praktik terkait pelaksanaan administrasi keuangan, serta pengelolaan aset BMN dan barang persediaan;
2. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Komunikasi Publik (Kehumasan)
 

Diperlukan kesiapan administrasi kepegawaian untuk kesempatan pengusulan diklat dan perencanaan konten media sosial dan perekrutan tenaga ahli khusus kehumasan;
3. Pembangunan Zona Integritas
 

Diperlukan kesiapan dan penunjukan SDM yang diprioritaskan untuk penyelesaian pemenuhan pembangunan Zona Integritas, serta integrasi penyusunan alur dan prosedur proses bisnis balai; dan
4. Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko
 

Diperlukan kesiapan dan waktu lebih untuk pemenuhan dokumen pendukung penilaian maturitas SPIP dan penyusunan dokumen manajemen risiko balai secara komprehensif.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:**

1. Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
 

Penyebab terkendalanya Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan BMN adalah SK Kesatkeran yang berubah-ubah yang tidak diimbangi dengan pembekalan pelatihan, baik dalam hal teori maupun praktik sebelum penunjukan personil yang melaksanakan kegiatan administrasi keuangan, serta personil yang mengelola aset BMN dan barang persediaan;
2. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Komunikasi Publik (Kehumasan)
 

Penyebab terkendalanya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Komunikasi Publik (Kehumasan) adalah terbatasnya kuota pegawai yang diusulkan dalam kegiatan

pengembangan kompetensi pegawai, dan terbatasnya kemampuan pengampu bidang komunikasi dan pelayanan publik dan tenaga ahli, serta kurangnya perangkat/fasilitas penunjang untuk perencanaan dan evaluasi konten media sosial.

### 3. Pembangunan Zona Integritas

Penyebab terkendalanya Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas adalah ketidaksiapan dalam hal waktu penilaian Zona Integritas yang tentatif dan banyaknya kegiatan yang berhubungan dengan proses bisnis balai yang harus diselesaikan, sehingga menyebabkan kurangnya SDM yang diprioritaskan untuk penyelesaian pembangunan Zona Integritas; dan

### 4. Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko

Penyebab terkendalanya Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko adalah ketidaksiapan dan kurangnya waktu pemenuhan penilaian maturitas dan masih rendahnya *awareness* terhadap penyusunan manajemen risiko yang masih dianggap sebagai formalitas.

## Rekomendasi untuk Perbaikan Tahun Selanjutnya:

Beberapa rekomendasi yang dibutuhkan untuk perbaikan tahun selanjutnya diantaranya:

1. Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
  - a. Perubahan SK Kesatkeran menjadi suatu tantangan tersendiri dalam pemenuhan kegiatan administrasi keuangan dan pengelolaan aset BMN dan barang persediaan. Pelaksanaan kegiatan ini telah berjalan secara baik dan tepat waktu. Hal ini terbukti dengan diperolehnya Tanginas Award pada Triwulan III Tahun 2021 untuk kategori Penyampaian LPJ dan Rekonsiliasi Secara Tepat Waktu dan Akurat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama tim yang baik dan pelaporan yang dilakukan secara disiplin;
  - b. Pelaksanaan pelatihan pemahaman administrasi keuangan dan pengelolaan aset BMN dan barang persediaan, beserta Aplikasi SAKTI dilakukan lebih awal (pada tahun anggaran), agar Petugas Keuangan dan BMN, serta persediaan dapat memahami lebih awal mengenai Aplikasi SAKTI;
  - c. Peningkatan kerja sama tim dan kedisiplinan dalam pelaporan; dan
  - d. Koordinasi secara intensif dengan KPPN dan narasumber untuk pengelolaan keuangan dan BMN;
2. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Komunikasi Publik (Kehumasan)
  - a. Diperlukan koordinasi dan rekonsiliasi untuk setiap proses usulan administrasi kepegawaian dapat terus dilaksanakan baik dengan Setditjen maupun dengan BKO;
  - b. Untuk menghindari tertundanya kenaikan pangkat, sebaiknya angka kredit para pejabat fungsional diusulkan pada tahun kedua atau tahun ketiga dari masa aktif jabatan fungsionalnya;

- c. Perlu dipertimbangkan untuk perekrutan atau perpanjangan kontrak untuk tenaga ahli Komunikasi Publik dan penunjukkan tenaga ahli Humas dalam suatu surat keputusan untuk tahun berikutnya;
  - d. Pengikutsertaan anggota komunikasi publik dan kehumasan dalam kegiatan pelatihan atau *workshop* maupun *transfer of knowledge* antar anggota terkait komunikasi publik dan kehumasan;
  - e. Pelatihan khusus untuk seluruh entitas pegawai BPLJ terkait fotografi untuk memudahkan pengumpulan dokumentasi kegiatan balai agar semua pegawai dapat berpartisipasi dalam dokumentasi kegiatan atau penyediaan anggaran khusus bagi tenaga ahli Komunikasi Publik untuk setiap pendampingan dokumentasi kegiatan penting balai;
  - f. Pelaksanaan perencanaan konten media sosial, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan media sosial secara berkala pada awal bulan; dan
  - g. Pengadaan perangkat fasilitas penunjang sebagai pendukung dalam pelaksanaan dari perencanaan konten media sosial.
3. Pembangunan Zona Integritas
    - a. Penyiapan semua bukti dukung pembangunan zona integritas pada 6 (enam) area perubahan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
    - b. Pengajuan usulan nama-nama pegawai yang diprioritaskan untuk penyelesaian pembangunan Zona Integritas; dan
    - c. Pengusulan pembuatan kebijakan tertulis dan disosialisasikan kembali secara khusus kepada pegawai yang melakukan pekerjaan dan pegawai yang berhak mendapatkan pelayanan;
  4. Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko
    - a. Penyiapan semua bukti dukung penilaian maturitas SPIP yang sesuai format yang berlaku di Bina Marga; dan
    - b. Penyusunan secara komprehensif terkait manajemen risiko balai.



**Gambar 4.10** Kegiatan Kepegawaian Tahun 2022

## 4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing instansi pemerintah. Proses pengukuran kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, output (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Adapun perbandingan capaian kinerja output beberapa tahun terakhir dan perbandingan realisasi kinerja dengan target renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5** Perbandingan Capaian Output Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

No	OUTPUT	SAT	2020*			2021			2022		
			Tar get	Real isasi	Kin erja	Tar get	Real isasi	Kin erja	Tar get	Real isasi	Kin erja
1	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomenda si Kebijakan	1	1	100	1	1	100	1	1	100
2	Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan <sup>1</sup>	Rekomenda si Kebijakan	1	1	100	1	1	100	-	-	-
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100	1	1	100	1	1	100
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100	1	1	100	-	-	-
5	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	100	1	1	100	1	1	100
6	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal <sup>2</sup>	Layanan	-	-	-	-	-	-	1	1	100
7	Layanan Umum <sup>2</sup>	Layanan	-	-	-	-	-	-	1	1	100

\* RKAKL masih menyatu dengan Satker Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

<sup>1</sup> Sesuai dengan Renstra Bina Marga 2020-2024, output tersebut bukan output balai teknis

<sup>2</sup> Terdapat perubahan output dukungan manajemen namun masih memiliki sub komponen yang sama

**Tabel 4.6** Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

No	OUTPUT	SAT	Targ et Ren stra 2020 - 2024	2020*	2021	2022		Capaian Kumulatif
				Realisasi	Realisasi	Tar get	Realisasi	
1	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	5	1	1	1	1	100
2	Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan <sup>1</sup>	Rekomendasi Kebijakan	-	1	1	-	-	-
3	Layanan Perkantoran	Layanan	5	1	1	1	1	100
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	5	1	1	-	-	66,6

5	Layanan Sarana Internal	Unit	5	1	1	1	1	100
6	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal <sup>2</sup>	Layanan	-	-		1	1	33,3
7	Layanan Umum <sup>2</sup>	Layanan	-	-		1	1	33,3

\* RKAKL masih menyatu dengan Satker Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

<sup>1</sup> Sesuai dengan Renstra Bina Marga 2020-2024, output tersebut bukan output balai teknis

<sup>2</sup> Terdapat perubahan output dukungan manajemen namun masih memiliki sub komponen yang sama

Dalam mengukur kinerja berbasis *outcome*, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menyusun SK IKU, perbandingan capaian kinerja internal berbasis *outcome* berdasarkan SK IKU BPLJ dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7** Perbandingan Capaian *Outcome* Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

INDIKATOR KINERJA UTAMA BPLJ	SAT	2020			2021			2022			
		Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja	
Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan											
Parameter	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	%	90	-	-	90	91,67	100	90	92,86	100
Parameter	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	Dok	80	-	-	82	88,86	100	85	91,87	100

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survei melalui koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Meskipun merupakan Balai yang baru, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan selalu berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tiap tahunnya.

Pada Tahun Anggaran 2020 Laporan Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan masih bergabung dalam LKIP Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Kondisi pandemi Covid-19 cukup berpengaruh pada pelaksanaan anggaran di tahun 2020 – 2021, sehingga kegiatan yang lakukan belum optimal. Pada Tahun 2022, BPLJ sudah dapat beradaptasi dengan kondisi pandemik Covid-19 sehingga kegiatan di lingkungan BPLJ dapat dioptimalkan. Disisi lain, terdapat kebijakan TKDN sehingga sebagian pengadaan barang di lingkungan BPLJ tidak dapat dilakukan yang mengakibatkan kinerja BPLJ menjadi kurang optimal. Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan balai, BPLJ menyusun tiga Kelompok Bidang Keahlian

sebagai struktur organisasi kelompok jabatan fungsional, sehingga kegiatan-kegiatan kajian kebijakan serta pelayanan teknis di bidang perkerasan dan lingkungan jalan lebih terkendali.

Pada Tahun 2022 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja, dalam hal ini Output Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan dihilangkan menyesuaikan target perjanjian kinerja yang ada pada Renstra Bina Marga 2020 – 2024 dan penyesuaian kembali output pada indikator kinerja Dukungan Manajemen Kementerian. Tahun 2022, BPLJ berusaha untuk meningkatkan kinerjanya khususnya untuk kegiatan pelayanan teknis. Pada tahun 2022, BPLJ melakukan kegiatan-kegiatan sejumlah 4 kajian teknis, 10 penyusunan standar pedoman, serta menerima 216 layanan teknis yang terdiri atas 40 kegiatan advis teknis, 18 kegiatan layanan pengujian baik berupa layanan pengujian eksternal (PNBP) maupun layanan pengujian internal, serta pendampingan teknis berupa rapat maupun sebagai narasumber untuk memberikan rekomendasi penanganan atas permasalahan yang ditinjau. Dalam hal ini, terjadi peningkatan kinerja di BPLJ dari yang sebelumnya kegiatan kajian pengembangan dan penerapan teknologi sejumlah 4 kegiatan pada tahun 2020 dan 12 kegiatan pada tahun 2021, serta peningkatan pada jumlah pelayanan teknis dari sebelumnya 123 kegiatan layanan teknis pada tahun 2021.

**Tabel 4.8** Perbandingan Capaian Output Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dan Balai Bahan Jalan TA.2022

NO	OUTPUT		SAT	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan			Balai Bahan Jalan		
				TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
1	ABF 001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
2	ABF 007	Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	1,00	1,00	100,00
3	EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1,00	1,00	100	1,00	1,00	100,00
4	EBA 962	Layanan Umum	Layanan	1,00	1,00	100	1,00	1,00	100,00
5	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	1,00	100	1,00	1,00	100,00
6	EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit	1,00	1,00	100	1,00	1,00	100,00

Perbandingan capaian output kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dengan Balai Teknik lainnya, dalam hal ini yang menjadi perbandingan adalah Balai Bahan dapat dilihat pada Tabel 4.8 Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing Balai dapat memenuhi target capaian output di TA.2022, meskipun terdapat 1 output yang berbeda. Di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tidak terdapat output ABF-007 Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan karena berdasarkan Renstra Bina Marga output tersebut masuk kedalam output Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan sehingga output utamanya adalah Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan yang meliputi Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Pendukung Pengujian, Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Hal ini sesuai dengan tugas Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan yang tertuang dalam pasal 124 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020.

### 4.3 Realisasi Anggaran

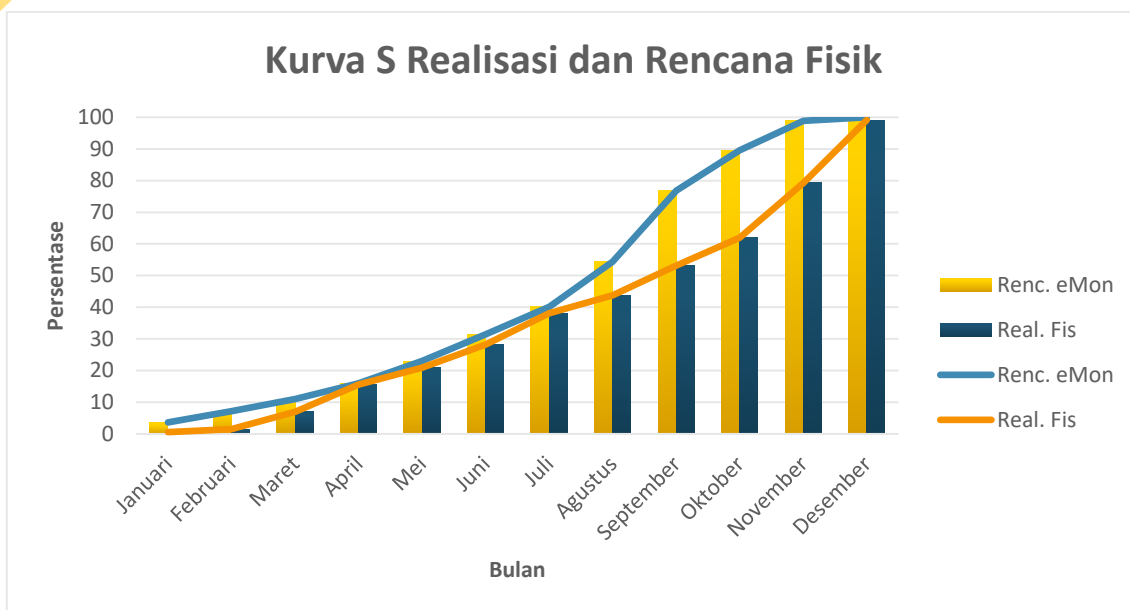
Berdasarkan e-monitoring PUPR, PAGU Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 11.179.184.000, dengan realisasi sebesar Rp 10.849.204.000 atau menyerap anggaran sebesar 97,05%, sedangkan realisasi fisik sampai akhir tahun anggaran 2022 sudah mencapai nilai 99,12%. Perbandingan realisasi anggaran dengan PAGU Anggaran Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.9, sedangkan kurva S capaian fisik dan keuangan dapat dilihat pada Gambar 4.11 Kurva S Realisasi dan Rencana Fisik TA 2022 dan Gambar 4.12.

**Tabel 4.9** Perbandingan Realisasi Anggaran dengan PAGU Anggaran Tahun 2022

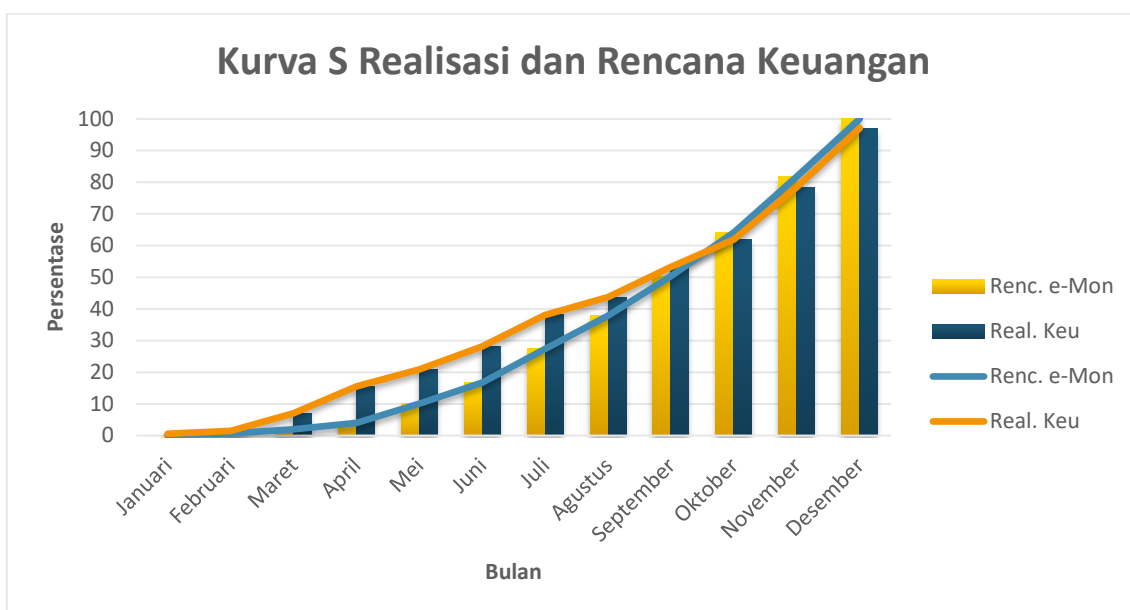
NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KET
		AWAL *PK Revisi	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
	BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN	11.179.184	11.179.184	10.849.204	97,05	97,05	
	Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
	IKP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional	6.333.263	6.333.263	6.112.359	96,51	96,51	
	Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan						
84	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	6.333.263	6.333.263	6.112.359	96,51	96,51	
	Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	2.178.019	2.178.019	2.127.727	97,69	97,69	

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KET
		AWAL *PK Revisi	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
	Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan Pendukung Pengujian	1.223.180	1.223.180	1.221.881	99,89	99,89	
	Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	2.932.064	2.932.064	2.762.751	94,23	94,23	
Sasaran Program : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		4.845.921	4.845.921	4.736.845	97,75	97,75	
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan							
88	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.114.915	2.114.915	2.053.307	97,09	97,09	
	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	2.114.915	2.114.915	2.053.307	97,09	97,09	
89	EBA 962 Layanan Umum	442.790	442.790	411.617	92,96	92,96	
	Administrasi Kesatkeran	155.272	155.272	153.071	98,58	98,58	
	Operasional Pimpinan	287.518	287.518	258.546	89,92	89,92	
90	EBA 994 Layanan Perkantoran	1.410.126	1.410.126	1.402.660	99,47	99,47	
	Belanja Uang Lembur	61.000	61.000	60.987	99,98	99,98	
	Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana	984.641	984.641	979.039	99,43	99,43	
	Operasional Perkantoran	364.485	364.485	362.634	99,49	99,49	
91	EBB 951 Layanan Sarana Internal	878.090	878.090	869.261	98,99	98,99	
	Pengadaan Kantor dan Laboratorium	878.090	878.090	869.261	98,99	98,99	





**Gambar 4.11** Kurva S Realisasi dan Rencana Fisik TA 2022



**Gambar 4.12** Kurva S Realisasi dan Rencana Keuangan TA 2022

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan merupakan balai yang terbentuk pada tahun 2020 akibat reorganisasi Balitbang yang sebelumnya merupakan bagian dari Pusjatan (saat ini Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Sampai saat ini Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tidak memiliki aset kendaraan operasional, bangunan dan tanah, serta alat-alat pengujian karena aset yang digunakan merupakan aset yang terdaftar dalam Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Hal ini berpengaruh pada penyerapan anggaran karena

dalam perjalanannya dibutuhkan pemeliharaan dan beberapa renovasi terkait bangunan atau gedung yang ditempati serta pemeliharaan alat pengujian maupun kendaraan operasional yang digunakan, menggunakan anggaran Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Selain itu diperlukan pengadaan unit komputer, alat laboratorium, alat kantor dll yang cukup mempengaruhi kinerja Balai.

Selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan melakukan empat kali perubahan anggaran. Penggunaan anggaran BPLJ dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dan atasan. Kebijakan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mengubah rencana kegiatan BPLJ yang sebelumnya berencana untuk mengadakan alat pengujian impor berupa alat ketidakrataan dan retroreflektif sehingga dilakukan pengurangan PAGU anggaran. Selain ditanggungkannya pembelian alat survei impor dan perbaikan alat dengan mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri, Balai perkerasan dan lingkungan Jalan mencoba perbaikan alat dengan mengoptimalkan tenaga lokal.

Namun disisi lain, penggunaan aplikasi baru dalam administrasi keuangan dan kesatkeran cukup mempengaruhi hasil penyerapan anggaran pada tahun 2022. Tahun anggaran 2022 merupakan tahun pertama dalam penggunaan aplikasi Sakti yang dikembangkan oleh Kementerian keuangan. Terdapat beberapa kendala teknis dalam pengoperasiannya, salah satunya adalah pencatatan realisasi secara aktual. Dalam pencatatan tersebut terjadi pengulangan pencatatan yang mengakibatkan sisa pagu hampir mencapai 100%, akan tetapi secara aktual, capaian realisasi baru 97,05% sehingga diakhir tahun dana tidak terserap sebesar 2% akibat pencatatan ganda.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan didampingi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 66 orang pada tahun 2022 dengan rincian 46 orang PNS, 17 orang pegawai non PNS dan 3 orang konsultan individu. Jumlah SDM ini berkurang dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 67 orang pegawai pada tahun 2021. Pengurangan pegawai ini diakibatkan oleh mutasi beberapa pegawai ke unit kerja lain namun disisi lain juga ada penambahan pegawai dari unit kerja lainnya.

Sebagai perbandingan pagu dan realiasi anggaran terkait outcome dari Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

**Tabel 4.10** Perbandingan Realisasi Anggaran Satker BPLJ

Tahun Anggaran	Jumlah SDM	PAGU	Realisasi Anggaran	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
2020*	56	-	-	100%
2021	67	9.460.457.000	9.391.455.000	100%
2022	66	11.179.184.000	10.849.205.000	99,12%

#### 4.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Balai TA.2021

Hasil evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2021 telah disampaikan berdasarkan Surat Nomor PW.0204-BP3/009.32 Perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Adapun pelaksanaan evaluasi SAKIP BPLJ Tahun Anggaran 2021 tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP dan SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 12/KPTS/Db/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Keputusan Tim Evaluasi SAKIP pada Unit Kerja dan UPT Tahun 2021 di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Untuk fokus evaluasi SAKIP BPLJ meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*) dengan cakupan evaluasi meliputi komponen: (1) Perencanaan Kerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal, dan (5) Pencapaian Sasaran/Kinerja. Berdasarkan penilaian komponen tersebut, maka implementasi atas SAKIP BPLJ Tahun Anggaran 2021 dikategorikan BB (Sangat Baik), akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dengan nilai angka 76,89%. Akan tetapi, terhadap beberapa catatan atas kelemahan yang masih ada, berikut adalah rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Evaluasi sebagai bahan evaluasi BPLJ, sebagaimana tercantum pada Berita Acara Verifikasi Hasil Evaluasi SAKIP pada Tabel 4.11.

**Tabel 4.11** Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPLJ

No.	Kriteria Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Renstra agar menjelaskan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai oleh Unit Kerja.</li> <li>Tujuan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan dan target keberhasilan yang selaras dengan Renstra atasannya.</li> <li>Output kegiatan yang dimuat dalam Renstra harus SMART.</li> <li>Dokumen Renstra agar direviu secara berkala.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poin a, b dan d, kalimat tujuan sudah disesuaikan dan dilengkapi dengan ukuran dan target keberhasilan dalam reviu Renstra BPLJ.</li> <li>Poin c untuk output kegiatan yang dimuat dalam Renstra harus SMART, sehingga untuk menjawab hal tersebut, BPLJ telah menurunkan ke dalam perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022.</li> </ul>
2.	Pengukuran Kinerja	Capaian indikator kinerja dapat dijadikan pertimbangan pimpinan dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .	Pertimbangan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> telah berdasarkan capaian indikator kinerja yang diperkuat dengan SK dan SOP Pemberian Penghargaan dan Sanksi pada Pegawai di Lingkungan BPLJ.
3.	Pelaporan Kinerja	Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan keseluruhan.	Telah disusun laporan monitoring dan evaluasi per bulan berisi hasil tindak lanjut terhadap bulan sebelumnya
4.	Evaluasi Internal	-	Pada Tahun 2022, akan dibandingkan evaluasi internal antara LKIP Tahun 2021 dan Tahun 2022.
5.	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rincian data capaian <i>outcome</i> harus dijelaskan dalam laporan kinerja.</li> <li>Agar unit kerja dapat membuat inovasi yang akan meningkatkan efektivitas manajemen kerja.</li> <li>Agar unit kerja dapat meningkatkan prestasi dalam memperoleh penghargaan tingkat nasional.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poin a, BPLJ <i>outcome</i> telah dijelaskan sesuai dengan perubahan IKU Tahun 2022.</li> <li>Poin b, BPLJ memiliki inovasi yang meningkatkan efektivitas manajemen kinerja seperti Sistem Informasi Manajemen Drainase Jalan (SIMDJ) dan Software Desain Perkerasan Jalan (SDPJ) yang diperkenalkan pada Pembangunan Zona Integritas</li> <li>Poin c, BPLJ sebagai 8 besar unit kerja di Kementerian PUPR yang berhasil dinilai pada tahap nasional dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK.</li> </ul>

Terhadap rekomendasi-rekomendasi tersebut, pada 25 November 2022 lalu, BPLJ melaksanakan Pembahasan Laporan Kinerja TA 2022, Perjanjian Kinerja (PK) 2022 dan Reviu Renstra BPLJ sesuai dengan Nota Dinas Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Nomor 389/ND-UM/Bb.37/2022.



**Gambar 4.13** Dokumentasi Pembahasan Laporan Kinerja TA 2022, Perjanjian Kinerja (PK) 2022 dan Reviu Renstra BPLJ

Berikut adalah beberapa catatan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan:

- a. Disampaikan catatan hasil evaluasi SAKIP pada Tahun 2021 atas rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Balai TA 2021
- b. Pada Perencanaan Kinerja:
  - Poin a, b, dan d untuk Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPLJ 2020-2024 sudah disesuaikan untuk tujuannya yang dilengkapi dengan ukuran dan target keberhasilan sesuai dengan dalam Reviu Renstra BPLJ, namun untuk Revisi Renstra harus menunggu Revisi Renstra Kementerian PUPR dan Direktorat Jenderal Bina Marga.
  - Poin c untuk output kegiatan yang dimuat dalam Renstra harus SMART, sehingga untuk menyasati hal tersebut, BPLJ telah menurunkan ke dalam perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022.

- c. Pada Pengukuran Kinerja, pertimbangan pemberian reward dan punishment telah berdasarkan capaian indikator kinerja yang diperkuat dengan SK dan SOP Pemberian Penghargaan dan Sanksi pada Pegawai di Lingkungan BPLJ.
- d. Pada Pelaporan Kinerja, telah disusun laporan monitoring dan evaluasi per bulan berisi hasil tindak lanjut terhadap bulan sebelumnya.
- e. Pada Evaluasi Internal, akan dibandingkan evaluasi internal antara LKIP Tahun 2021 dan Tahun 2022.
- f. Pada Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi:
  - Poin a, BPLJ *outcome telah* dijelaskan sesuai dengan perubahan IKU Tahun 2022.
  - Poin b, BPLJ memiliki inovasi yang meningkatkan efektivitas manajemen kinerja seperti halnya yang diperkenalkan pada Pembangunan Zona Integritas
  - Poin c, BPLJ sebagai 8 besar unit kerja di Kementerian PUPR yang berhasil dinilai pada tahap nasional dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Permasalahan

Pada Tahun 2022, capaian kinerja kegiatan di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mencapai 99.63% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 97.05%. Secara keseluruhan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah berhasil memenuhi target pada Perjanjian Kinerja.

Adapun hambatan dan kendala utama yang dihadapi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan awal dalam Dokumen RKA dan target perjanjian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan belum cukup matang serta terdapat permintaan-permintaan yang bersifat direktif, sehingga pada saat pelaksanaannya perlu beberapa kali perubahan anggaran (revisi DIPA).
- b. Terdapat perubahan kebijakan pimpinan serta kegiatan-kegiatan yang bersifat direktif dari atasan yang berpengaruh terhadap efektivitas kinerja balai baik dalam melakukan kegiatan maupun penyerapan anggaran yang telah diprogramkan sebelumnya.
- c. Pendistribusian pekerjaan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan masih belum berimbang dikarenakan ketimpangan kuantitas dan keterbatasan kualifikasi baik dalam bidang keteknisan maupun bidang administratif kesatkeran.
- d. Keterlambatan dalam perbaikan alat survei akibat kebijakan penggunaan produk dalam negeri sehingga harus mengusahakan perbaikan alat menggunakan sumber daya lokal.
- e. Beban kerja SDM menjadi berlebih akibat banyaknya disposisi direktif pimpinan dan undangan pembahasan daring terkait layanan teknis dengan permasalahan yang tipikal (pada level yang belum membutuhkan keterlibatan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan).

#### 5.2 Rekomendasi

Beberapa langkah antisipatif yang akan dilakukan agar kendala yang dihadapi tahun ini tidak terulang pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pada awal perencanaan anggaran berikutnya harus mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Perlu dipastikan

Kembali Perjanjian Kinerja sudah selaras dengan Rencana Strategis, sehingga meminimalisir perubahan anggaran (revisi DIPA).

- b. Pengembangan SDM perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kebutuhan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Sejalan dengan hal tersebut, perlu diadakan secara intensif kegiatan-kegiatan antara lain: in house training; Pendidikan dan pelatihan; vokasi maupun pemerataan kualifikasi SDM teknis; serta penggunaan tenaga bantuan pihak luar yang berkompeten pada bidang terkait di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.
- c. Mengefektifkan pembentukkan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) yang merupakan penugasan direktif pimpinan, sehingga pembahasan terkait permasalahan teknis lapangan dilakukan oleh tim/personil yang benar-benar kompeten.
- d. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- e. Perlunya pemetaan permasalahan-permasalahan teknis untuk penentuan prioritas layanan yang lebih membutuhkan peran Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Penentuan prioritas layanan ini dilakukan sebagai langkah preventif, sehingga kondisi-kondisi lapangan yang berpotensi terjadi kesalahan dapat dideteksi sedini mungkin.

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan akan terus menerus meningkatkan komitmen dan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungannya. Penerapan SAKIP yang baik akan sangat berperan dalam meningkatkan perwujudan budaya akuntabilitas kinerja pada jajaran aparat Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga guna mewujudkan *Good Governance*. Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, dapat menjadi masukan atau umpan balik bagi peningkatan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga di tahun yang akan datang. Satuan Kerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan diharapkan dapat menyusun rencana kinerja yang lebih baik dan dapat mengantisipasi permasalahan potensial yang mungkin terjadi.

Akhir kata, Laporan Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2022 ini diharapkan menjadi laporan kinerja yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, baik di dalam lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan maupun di luar lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, serta dapat menjadi pedoman penyusunan laporan kinerja ke depan.



## LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal 2022
2. Perjanjian Kinerja Revisi 2022
3. Data Catatan Kaki Laporan Kinerja
4. Dokumentasi



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NENI KUSNIANTI  
Jabatan : KEPALA BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN  
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, Januari 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021		Target 2022	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<b>IKSP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>				
	<b>IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan</b>	100	%	100	%
	Parameter <i>Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik</i>	100	%	100	%
	Parameter <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>	1	Dokumen	1	Dokumen
	<b>Rincian Output</b>				
ABF 001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1	Rekomendasi Kebijakan	1	Rekomendasi Kebijakan

Kegiatan :

1. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran

Rp

11.929.184.000

Bandung, Januari 2022  
 Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Direktur Jenderal Bina Marga,



Hedy Rahadian



Neni Kusnianti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN	KETERANGAN
							(Dalam Ribuan Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<b>11.929.184</b>	
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						7.083.263	
		Rating Keselamatan Jalan Nasional						
		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana					7.083.263	
		ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan		1 Rekomendasi Kebijakan			7.083.263	
				102 Kajian Kebijakan			2.583.366	
			1 Dokumen		Kajian Rekomendasi Kebijakan PA Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	2.583.366	
				317 Peralatan Jalan dan Jembatan			1.330.945	
			1 Unit		PC Alat Ukur Ketidakraaan Jalan	Bandung	750.000	
			1 Unit		PD Alat Ukur Topografi	Bandung	580.945	
				404 Advis dan Layanan Teknis			3.168.952	
			1 Layanan		PE Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	3.168.952	
	Meningkatnya Dukungan Manajemen						4.845.921	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
		Layanan Dukungan Manajemen Internal					4.172.703	
		EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan				2.291.773	
				058 Pelayanan umum dan perlengkapan			2.291.773	
			1 Laporan		PM Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Bandung	2.291.773	
		EBA 962 Layanan Umum	1 Layanan				470.804	
				054 Pengelolaan keuangan			470.804	
			1 Laporan		PK Administrasi Kesatkeran	Bandung	183.076	
			1 Laporan		PL Operasional Pimpinan	Bandung	287.728	
		EBA 994 Layanan Perkantoran	1 Layanan				1.410.126	
				001 Gaji dan Tunjangan			61.000	
			1 Tahun		PH Belanja Uang Lembur	Bandung	61.000	
				002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1.349.126	
			1 Tahun		PI Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana	Bandung	959.100	
			1 Tahun		PJ Operasional Perkantoran	Bandung	390.026	
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal					673.218	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN	KETERANGAN
							(Dalam Ribuan Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		EBB 951 <i>Layanan Sarana Internal</i>	1 Unit				673.218	
				053 <i>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran</i>			673.218	
			1 Paket		PG <i>Pengadaan Kantor dan Laboratorium</i>	Bandung	673.218	



REVISI

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NENI KUSNIANTI  
Jabatan : KEPALA BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN  
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK PERTAMA** pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 20 Desember 2022

**PIHAK KEDUA**

**HEDY RAHADIAN**

**PIHAK PERTAMA**

**NENI KUSNIANTI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

REVISI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2021		Target 2022	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<b>IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>				
	<b>IKK : Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
	Parameter <i>Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik</i>	100,00	%	100,00	%
	Parameter <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>	1,00	Dokumen	1,00	Dokumen
	<b>Rincian Output</b>				
	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1,00	Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	<b>IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>				
	<b>IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>
	Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	100,00	%	100,00	%
	<b>Rincian Output</b>				
	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	1,00	Layanan
	EBA 962 Layanan Umum	1,00	Layanan	1,00	Layanan
	EBA 994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	1,00	Layanan
	EBB 951 Layanan Sarana Internal	1,00	Unit	1,00	Unit

Kegiatan :

1. Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran

Rp 6.333.263.000  
 Rp 4.845.921.000  
 Rp 11.179.184.000

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

Bandung, 20 Desember 2022  
 Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan



*Neni Kusnianti*  
 Neni Kusnianti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
						11.179.184	Total Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					6.333.263	
		<b>Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>					
		ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan		6.333.263	
				102	Kajian Kebijakan	2.178.019	
			1	Dokumen		2.178.019	Kajian Rekomendasi PA Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan
				317	Peralatan Jalan dan Jembatan	1.223.180	
			1	Unit		0	PC Alat Ukur Ketidakrataan Jalan
			1	Unit		1.223.180	Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan Pendukung Pengujian
				404	Advis dan Layanan Teknis	2.932.064	
			1	Layanan		2.932.064	Layanan Teknis Bidang PE Perkerasan dan Lingkungan Jalan
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya					4.845.921	
		<b>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>				4.845.921	
		EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan		2.114.915	
				058	Pelayanan umum dan perlengkapan	2.114.915	
			1	Laporan		2.114.915	Pelayanan Umum, Pelayanan PM Rumah Tangga dan Perlengkapan
		EBA 962 Layanan Umum	1,00	Layanan		442.790	
				054	Pengelolaan keuangan	442.790	
			1	Laporan		155.272	PK Administrasi Kesatkeran
			1	Laporan		287.518	PL Operasional Pimpinan
		EBA 994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan		1.410.126	
				001	Gaji dan Tunjangan	61.000	
			1	Tahun		61.000	PH Belanja Uang Lembur



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.349.126	
			1 Tahun		Pemeliharaan Gedung PI Kantor, Sarana dan Prasarana	984.641	
			1 Tahun		PJ Operasional Perkantoran	364.485	
		<b>EBB</b> <b>951</b> Layanan Sarana Internal	1,00 Unit			878.090	
				053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran	878.090	
			1 Paket		PG Pengadaan Kantor dan Laboratorium	878.090	

CATATAN KAKI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ) TAHUN 2022  
SATUAN KERJA BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(7)*100	(7)	(8)=(6)/(4)*100	(9)=(6)/(5)*100	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(13)*100	(17)=(15)/(14)*100	(18)
												11.179.184	11.179.184	10.849.205	97,05	97,05	Total Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional											6.333.263	6.333.263	6.112.360	96,51	96,51	
		<b>Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>															
		ABF Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1,00 Rekomendasi Kebijakan	1,00 Rekomendasi Kebijakan	1,00 Rekomendasi Kebijakan	100	100	100				6.333.263	6.333.263	6.112.360	96,51	96,51	
									102 Kajian Kebijakan			2.178.019	2.178.019	2.127.727	97,69	97,69	
			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100	100		Kajian Rekomendasi PA Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	2.178.019	2.178.019	2.127.727	97,69	97,69	
									317 Peralatan Jalan dan Jembatan			1.223.180	1.223.180	1.221.881	99,89	99,89	
			1 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0	-		PC Alat Ukur Ketidakrataan Jalan	Bandung	0	0	0	-	-	
			1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	100	100		Pengadaan dan pemeliharaan Peralatan Pendukung Pengujian	Bandung	1.223.180	1.223.180	1.221.881	99,89	99,89	
									404 Advis dan Layanan Teknis			2.932.064	2.932.064	2.762.751	94,23	94,23	
			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100	100	100		Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	2.932.064	2.932.064	2.762.751	94,23	94,23	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya											4.845.921	4.845.921	4.736.845	97,75	97,75	
		<b>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>															
		EBA Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00 Layanan	1,00 Layanan	1,00 Layanan	98,92	100	100				2.114.915	2.114.915	2.053.307	97,09	97,09	
									058 Pelayanan umum dan perlengkapan			2.114.915	2.114.915	2.053.307	97,09	97,09	
			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	98,92	100	100		Pelayanan Umum, Pelayanan PM Rumah Tangga dan Perlengkapan	Bandung	2.114.915	2.114.915	2.053.307	97,09	97,09	
		EBA Layanan Umum	1,00 Layanan	1,00 Layanan	1,00 Layanan	99,5	100	100				442.790	442.790	411.617	92,96	92,96	
									054 Pengelolaan keuangan			442.790	442.790	411.617	92,96	92,96	
			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	98,58	100	100		PK Administrasi Kesatkeran	Bandung	155.272	155.272	153.071	98,58	98,58	
			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	100	100		PL Operasional Pimpinan	Bandung	287.518	287.518	258.546	89,92	89,92	
		EBA Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	1,00 Layanan	1,00 Layanan	100	99,47	100				1.410.126	1.410.126	1.402.660	99,47	99,47	
									001 Gaji dan Tunjangan			61.000	61.000	60.987	99,98	99,98	
			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	99,98	100	100		PH Belanja Uang Lembur	Bandung	61.000	61.000	60.987	99,98	99,98	
									002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1.349.126	1.349.126	1.341.673	99,45	99,45	
			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	99,43	100	100		PI Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana	Bandung	984.841	984.841	979.039	99,43	99,43	
			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	99,49	100	100		PJ Operasional Perkantoran	Bandung	364.485	364.485	362.634	99,49	99,49	
		EBB Layanan Sarana Internal	1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	98,99	100	100				878.090	878.090	869.261	98,99	98,99	
									053 Pengadaan dan pengadaan			878.090	878.090	869.261	98,99	98,99	
			1 Paket	1 Paket	1 Paket	98,99	100	100		PG Pengadaan Kantor dan Laboratorium	Bandung	878.090	878.090	869.261	98,99	98,99	

## DOKUMENTASI

### 1. Dokumentasi Kegiatan Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan

#### Kegiatan Harmonisasi Spesifikasi Umum

##### a. FGD Harmonisasi Spesifikasi Umum Ke-1

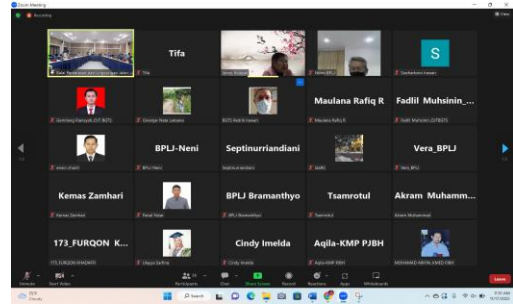


##### b. FGD Harmonisasi Spesifikasi Umum Ke-2



##### c. FGD Harmonisasi Spesifikasi Umum Ke-3



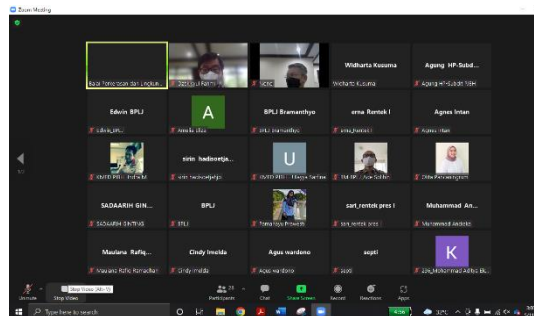
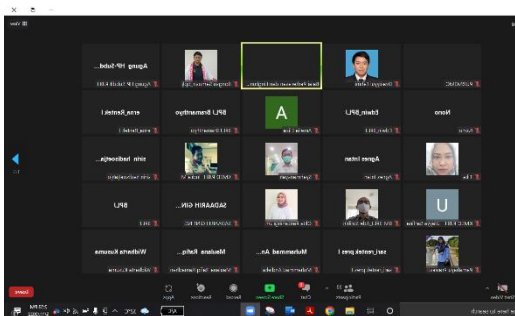


Kegiatan Harmonisasi Manual Desain Perkerasan Jalan



Kegiatan Pengembangan Aplikasi Software Desain Perkerasan Jalan (SDPJ) 2.0

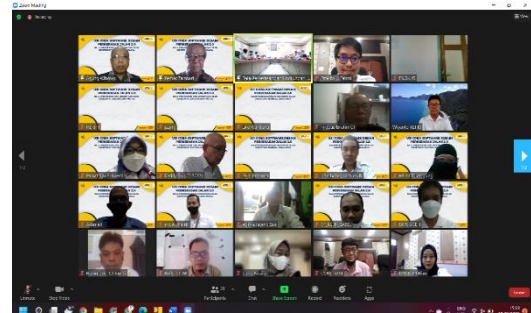
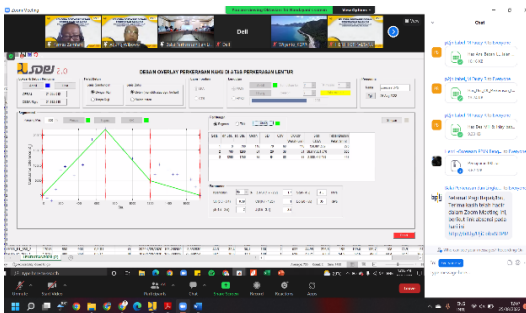
a. Uji Coba SDPJ Ke-1



b. Uji Coba SDPJ Ke-2



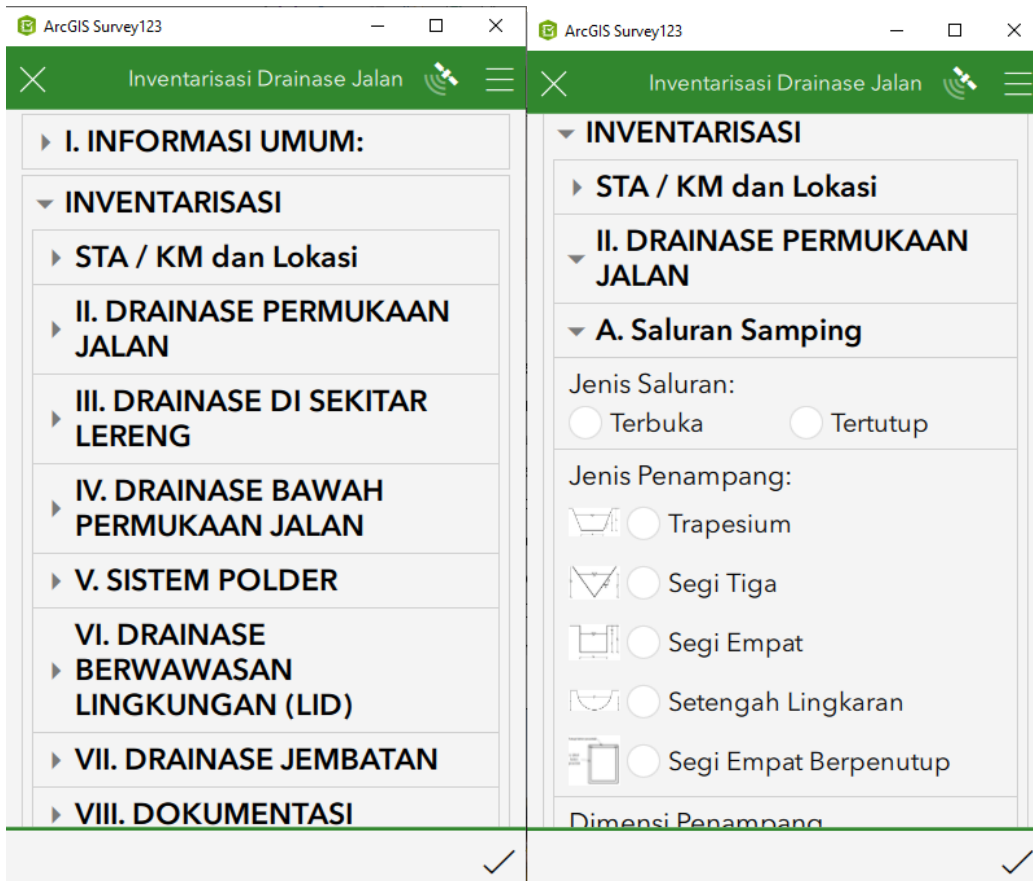
c. Uji Coba SDPJ Ke-3



## 2. Dokumentasi Kegiatan Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan

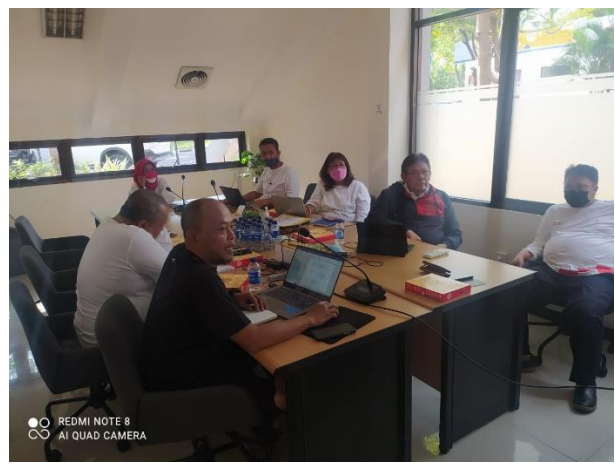








### 3. Dokumentasi Kegiatan Kelompok Bidang Keahlian Teknik Lalu Lintas



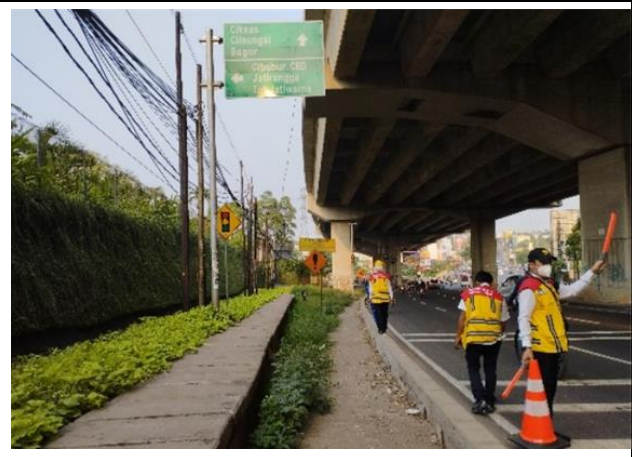
**Diskusi dengan nara sumber**



**Diskusi dengan stakeholder**



**Survei Primer (Penimbangan berat sumbu dan pengukuran dimensi kendaraan)**



**Survei Primer (Observasi lokasi rawan kecelakaan)**



**Survei Primer (Observasi kelandaian)**



**Nara sumber/ Pembicara WEB Binar Gambar Standar**